

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RGEK  
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**



**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

Nama: Ingrid Prima Fitria Englantine

No.Mahasiswa: 14311339

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RGEK  
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana  
Strata- 1 Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Ingrid Prima Fitria Englantine

No.Mahasiswa: 14311339

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis,



Ingrid Prima Fitria Englantine

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RGEK  
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ingrid Prima Fitri Englantine

No. Mahasiswa: 14311339

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal.....

Dosen Pembimbing,



(Sri Mulyati, Dra., M.Si.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RGEK PADA BANK SYARIAH DI  
INDONESIA TAHUN 2012-2016**

Disusun Oleh : **INGRID PRIMA FITRIA ENGLANTINE**

Nomor Mahasiswa : **14311339**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 12 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sri Mulyati, Dra., M.Si.

  
.....

Penguji : Nur Fauziah, Dra., MM.

  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

*La taHzan, innAllaha ma'ana*

“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdo'alah.”  
(Muhammad Fathir)

“Hal yang paling buruk yang bisa kamu lakukan adalah memikirkan kalau kamu adalah orang yang paling nggak berguna”  
(Doraemon)

## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode RGEC Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2012 – 2016”. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S-1 Sarjana Manajemen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi sangatlah sulit bagi penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, papa (Mardiyono) dan mama (Endah Nur Istiwati) yang ingin saya balas jasanya. Tidak cukup ucapan terima kasih yang Eng berikan. Setiap langkah Eng sampai saat ini tidak lepas dari do’a dan perjuangan papa dan mama tersayang. Semoga ini menjadi langkah awal dalam meraih kesuksesan yang selalu menjadi do’a papa dan mama.
2. Adik-adik saya, Bella Katherine Salsabilla dan Putri Intan Oktavia yang selalu menghina saya agar cepat selesai skripsinya namun memberikan dukungan dari dalam dan begitu baik karena secara tidak langsung selalu mengingatkan, aaaak sayang.
3. Bernad a.k.a Berlian Fahri yang selalu memberikan momen untuk Eng buat ga bosan tapi terkadang berat dijalani, terimakasih karena menemani Eng di akhir semester yang berat ini tapi asik. Semangat untuk S.T 2018 nya ya. Love lah!

4. Ibu Sri Mulyati, Dra., M.Si. yang selalu memberikan warna dalam membimbing saya sehingga skripsinya terasa berwarna – warni.
5. Fidia Nur Cholifah yang sangat membantu Eng dalam mengerjakan skripsi karena selalu menjadi solusi dalam setiap kendala dan sabar dalam menghadapi Eng yang terkadang rewel sama skripsi sendiri. Begitu juga Adhinda Hafiza yang mendahului Eng lulus dan membuat Eng merasa harus segeramenyusul, akhirnya pecah telur tapi sayang.
6. Nudiardana terimakasih banyak karena selalu Eng repotkan disegala kondisi sesuka hati Eng untuk mendapatkan mood yang bagus dan tidak pernah marah.
7. Terimakasih keluarga besar Karim Suherman yang selalu menyemangati dan mendoakan dengan tulus tanpa henti dan tak lupa mengingatkan untuk selalu menebar senyum.
8. Ajeng Sarahdiva, Khoirunnisa dan Irla Aulia yang ntah lah apa tapi kalian ku sayang.
9. Devita, Ninda, Tya, Mega, Dilla, temen-temen KKN yang lucu, abang-abang, adek-adek dan semua teman-teman Eng yang sangat baik sama Eng terimakasih karena sudah menyemangati.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sepenuhnya sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta berguna untuk penelitian selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Meret 2018

Penulis,

Ingrid Prima Fitria Englantine

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xiii
<b>ABS`TRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.2 Penelitian Terdahulu .....	37
2.3 Kerangka Konsep Penelitian .....	38
<b>BAB III</b> .....	39
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Populasi dan Sampel .....	39
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	42
3.4 Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b> .....	49
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	49

4.1 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari <i>Non Performing Financing</i> .....	49
4.2 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari <i>Financing to Deposit Ratio</i> .....	64
4.3 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari <i>Good Corporate Governance</i> .....	79
4.4 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari <i>Return on Asset</i> .....	107
4.5 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	120
4.6 Analisis Kinerja Keuangan Bank .....	134
4.6.1 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio <i>Non Performing Financing</i> .....	134
4.6.2 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio <i>Financing to Deposit Ratio</i> .....	135
4.6.3 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio <i>Good Corporate Governance</i> .....	137
4.6.4 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio <i>Return on Asset</i> .....	138
4.6.5 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	140
<b>BAB V</b> .....	143
<b>PENUTUP</b> .....	143
5.1 Kesimpulan .....	143
5.2 Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	146
<b>LAMPIRAN</b> .....	148

## ABSTRAKSI

Kawasan ASEAN yang sudah memasuki Masyarakat Economic Asean (MEA) mendorong masyarakat untuk mencari dukungan dalam bentuk kerjasama dalam menghadapi kompetisi perdagangan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu bekerjasama dengan salah satu industri yang bergerak dibidang keuangan seperti perbankan. Karena perbankan dapat membantu aktivitas ekonomi di masyarakat, gunanya untuk mempercepat putaran ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Penelitian ini dilakukan terhadap 11 bank syariah yang ada di Indonesia dengan data dari periode 2012 – 2016, data diambil dari laporan keuangan yang dipublikasi di masing-masing website resmi perbankan yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode RGEK, langkah yang dilakukan adalah menghitung rasio keuangan lalu menganalisis hasil perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Bank Syariah dilihat dari *Risk Profile* dalam kategori baik, *Good Corporate Governance* dalam kategori baik, *Earnings* dalam kategori kurang baik, dan *Capital* dalam kategori sangat baik.

Kata Kunci: NPF, FDR, GCG, ROA, CAR

## **ABS`TRACT**

The ASEAN region that has entered the Economic Asean Community (EAC) encourages people to seek support in the form of cooperation to face of trade competition. One solution that can be done is in cooperation with one of the industries engaged in finance such as banking. Because banks can help economic activity in the community, the point is to accelerate the economic cycle. The purpose of this study is to determine the financial performance of Islamic Banking in Indonesia in terms of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Assets (ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR ). This study was conducted on 11 syariah banks in Indonesia with data from the period 2012 - 2016, the data is taken from financial reports published on each official banking website concerned. The method used in this study using RGEC method, the steps taken are to calculate the financial ratios and then analyze the results of calculations. The results showed that the financial performance of Sharia Banks is seen from Risk Profile in good category, Good Corporate Governance in good category, Earnings in bad category, and Capital in very good category.

Keywords: NPF, FDR, GCG, ROA, CAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memasuki era baru bagi semua Negara di kawasan ASEAN yaitu Masyarakat Economic Asean (MEA) yang masuk pada 1 Januari 2016 yang disetujui oleh 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2007. Tujuan dari terciptanya MEA adalah sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah regional dan internasional. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. MEA ini menyebabkan adanya kompetisi perdagangan di ASEAN yang akan semakin ketat karena MEA meleburkan batas-batas teritorial Negara dalam suatu pasar bebas.

Empat hal yang menjadi fokus pada MAE adalah kawasan Asia Tenggara yang digunakan sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi, memiliki tingkat kompetisi yang tinggi, menjadi kawasan yang memiliki perkembangan yang merata dan akan diintegrasikan terhadap perekonomian global ([www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com)). Dari keempat hal ini bisa digunakan sebagai gambaran untuk mencari peluang-peluang yang dimiliki pada MEA. Dalam pelaksanaannya MEA membutuhkan dukungan-dukungan seperti membutuhkan kerjasama dengan industri keuangan.

Perbankan merupakan salah satu industri yang bergerak dibidang keuangan, dalam kegiatannya perbankan menjadi lembaga yang memiliki peran intermediasi atau perantara antara pihak yang berlebihan dana dengan

pihak yang kekurangan dana. Karena fungsi utama Bank untuk pembangunan ekonomi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Sehingga secara tidak langsung membantu perputaran uang dalam masyarakat.

Dilihat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank yang menjadi badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berbentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lain dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Maka Perbankan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan sebagai penyediaan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif dengan suku bunga yang bersaing. Perbankan dapat membantu menyerap setiap aktivitas ekonomi di masyarakat, gunanya untuk mempercepat putaran ekonomi. Sehingga secara tidak langsung dapat membantu wilayah kecil dalam menciptakan bisnis baru. Dengan bantuan teknologi yang maju dengan memanfaatkan informasi yang beredar maka perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan melihat pesatnya perkembangan Bank yang berada di Indonesia tentu saja memerlukan pengawasan terhadap kinerja Bank. Dengan memperhatikan keadaan keuangan hingga kegiatan usaha masing-masing Bank menjadi sesuatu yang perlu dikontrol dilihat dari kebijakan perbankan yang diharapkan Bank di Indonesia mampu menciptakan dan

memelihara kesehatan secara individu maupun secara sistem. Maka dengan demikian Bank yang berada di Indonesia bersaing secara kompetitif dengan menjaga kinerja dari Bank tersebut.

Untuk menghadapi persaingan yang kompetitif ini maka Bank perlu memperhatikan kinerja dari Bank tersebut agar mampu menghadapi daya saing yang kompetitif selain itu juga harus memiliki sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh pesaing (Muhamad 2014). Bila kinerja Bank baik maka kepercayaan yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok juga akan meningkat.

Terdapat beberapa indikator penilaian untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Selama ini kinerja keuangan bank dinilai dengan metode CAMELS yang dikenalkan pada tahun 1991. Pada metode ini CAMELS terdiri dari *Capital* (C), *Assets* (A), *Management* (M), *Earnings* (E), *Liquidity* (L), dan *Sensitivity to Market Risk* (S). Penggunaan metode CAMELS diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 untuk penilaian tingkat kesehatan perbankan.

Namun adanya perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank maka metode CAMELS menjadi kurang efektif. Untuk itu terdapat metode baru yaitu RGEC yang terdiri dari *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). RGEC merujuk pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kinerja keuangan bank umum yang digunakan sebagai pengganti dari metode CAMELS.

Pada RGEC ini beberapa faktor ditata ulang yang sebelumnya berada di dalam CAMELS dan untuk melengkapinya terdapat faktor baru yang berada di RGEC. Selain itu juga terdapat beberapa unsur yang kemudian digabungkan menjadi satu faktor.

Pada penggunaan RGEC ini selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 13/24/DNDP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 didalamnya diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank. Pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) secara individual maupun secara konsolidasi.

Pada *risk profile* akan mengedepankan risiko pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi. Bila pada *good corporate governance* akan mengedepankan manajemen bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena merupakan pokok bahasan yang menjadi faktor penting dalam menilai kesuksesan manajerial dalam pengelolaan perusahaan. Pada *earnings* akan mengedepankan kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings* dan *sustainability earnings* bank. Pada *capital* akan mengedepankan penilaian terhadap kecukupan permodalan dan permodalan (PBI No. 13/1/PBI/2011).

Menurut penelitian terdahulu untuk mendeteksi kesulitan uang Bank Islam yang berada di Malaysia menunjukkan bahwa CAMELS merupakan pengukuran yang baik untuk mengetahui *financial distress* bank syariah.

Maka dari itu CAMELS bagus untuk meramalkan kinerja dan efisiensi untuk masa depan (Rahman and Masngut, 2014).

Menurut penelitian terdahulu yaitu tentang penilaian kinerja keuangan pada sector perbankan di India untuk bank swasta tua menunjukkan bahwa pada penelitian ini CAMELS digunakan untuk menilai kinerja bank-bank swasta tua yang berada di India. Mengungkapkan bahwa Tamilnad Mercantile Bank menduduki posisi pertama dalam peringkat komposit sesuai dengan kriteria dari CAMELS dengan menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Didalam penelitian ini juga terdapat Bank yang memiliki kinerja keuangan yang buruk sehingga perlu memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, efisiensi manajemen, likuiditas dan sensitivitas agar memiliki kinerja keuangan yang bagus (Aspal, 2014).

Menurut penelitian terdahulu yaitu analisis perbandingan Bank Lokal dan Luar Negeri di Ghana menunjukkan pada penelitian ini dengan membandingkan profitabilitas bertujuan untuk menemukan fluktuasi dalam kinerja bank asing dan local dalam semua rasio. Ditemukan kinerja bank asing lebih baik dalam ROA, CA, dan ROE. Sehingga dapat disimpulkan bank sing lebih baik kinerjanya daripada bank local pada periode yang diterliti. Dikarenakan bank asing mendapatkan bantuan modal yang besar dari induknya maka bank local kurang diuntungkan dan erbuang dari industry. Untuk itu diperlukannya persyaratan modal minimum untuk membantu melindungi bank lokal bersaing baik dengan mitra asing pada industry ini (Alnaa, 2016).

Menurut penelitian terdahulu tentang Kontrak keuangan, risiko dan kinerja perbankan syariah pada penelitian ini masih membutuhkan banyak penelitian tentang Bank Syariah yang secara optimal memanfaatkan asset mereka dan mengelola risiko sesuai performansi yang harus dihitung. Bank Syariah perlu di atur dalam sebuah cara terkait pembiayaan jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun juga untuk Bank Sentral harus menciptakan lapangan bermain untuk Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bila dilihat dari Bank Syariah tidak membebankan pada persyaratan modal dan juga likuiditas. Dan diperlukannya pembuatan Undang-Undang untuk pembentukan pasar uang Islam di Pakistan dan Negara islam lainnya (Siddiqui, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode RGEC Pada Bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2012-2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2012-2016?

- b. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2012-2016?
- c. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2012-2016?
- d. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2012-2016?
- e. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2012-2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitiannya, yaitu :

- a. Mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2012-2016.
- b. Mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2012-2016.

- c. Mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2012-2016.
- d. Mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2012-2016.
- e. Mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia ditinjau dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2012-2016.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pengelola perusahaan dan investor untuk menambah pengetahuan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat bagi penelitian ini :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk akademis terkait penggunaan metode RGEC terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk perbankan syariah di Indonesia terkait penggunaan metode RGEC dan memberikan motivasi untuk bisa meningkatkan kualitas Perbankan Syariah di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi penting dilihat dari segi kinerja keuangan, sehingga dapat dijadikan

pertimbangan dalam memilih dan memutuskan lembaga yang tepat sesuai syariat islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan Bank**

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu cara untuk menilainya dengan melihat profitabilitas perusahaan bila profitabilitas perusahaan semakin tinggi maka dapat dikatakan perusahaan tersebut semakin efektif dan efisien dalam operasionalnya.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia melihat keputusan No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 bahwa kinerja merupakan pencapaian yang dicapai dalam periode tertentu yang menunjukkan tingkat dari kesehatan perusahaan tersebut. Sehingga salah satu faktor dalam menilai dari kinerja keuangan adalah dengan melihat kesehatan bank tersebut. Sehingga dapat menarik masyarakat untuk semakin percaya dengan bank tersebut.

Macam-macam variabel yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank salah satunya dengan melihat laporan keuangan. Kemudian dapat dihitung dengan rasio-rasio yang mendukung dalam menilai kinerja keuangan bank tersebut. Tujuan akhir dari sebuah

perusahaan adalah mencapai *profit* sehingga *profit* merupakan ukuran keseluruhan prestasi sebuah perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting karena akan menggambarkan kondisi bank tersebut dan melihat apakah operasi yang dijalani berjalan secara normal atau tidak dan mampu memenuhi kewajibannya. CAMELS merupakan salah satu rasio keuangan yang sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan bank. Aspek didalam CAMELS terdiri dari *Capital (C)*, *Assets (A)*, *Management (M)*, *Earnings (E)*, *Liquidity (L)*, dan *Sensitivity to Market Risk (S)*. Dengan adanya perubahan zaman dari waktu ke waktu dan kemajuan dari zaman ke zaman maka penilaian kinerja keuangan yang sebelumnya menggunakan CAMELS berubah menjadi RGEC yang didalamnya terdiri aspek-aspek yang telah diperbaharui. Aspek didalam RGEC terdiri dari *Risk Profile (R)*, *Good Corporate Governance (G)*, *Earnings (E)* dan *Capital (C)*. Pada penelitian ini akan dinilai dengan rasio keuangan yaitu *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Return on asset (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

### 2.1.2 Bank

Bank dikatakan sebagai lembaga keuangan untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa penghimpun dana

disebabkan oleh masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan penyaluran dana disebabkan oleh masyarakat yang kekurangan dana (*deficit spending unit*). Penghimpunan dana bisa berupa giro, deposito tabungan dan simpanan lain. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2011).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1999 bank diartikan sebagai bank umum dan bank perpendanaan rakyat sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang yang berlaku. Untuk itu bank dapat dikatakan memiliki tiga fungsi yaitu :

- Agent of Trust

Sebuah kepercayaan menjadi kunci penting bagi kegiatan perbankan yang dapat dilihat dari menghimpun dana hingga menyalurkannya kembali. Sehingga kegiatan dari debitur hingga pihak bank tidak lagi menjadi pertimbangan yang sangat dalam dan tidak perlu begitu mengkhawatirkan. Untuk itu agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka terdapat imbal balik berupa balas jasa kepada si penyimpan berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan lain-lain.

- Agent of Development

Bila bank dapat memungkinkan masyarakat melakukan investasi distribusi serta konsumsi/jasa yang tidak terpisah dari uang dan bila berjalan lancar maka akan sangat membantu dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Karena sektor riil dan sektor moneter merupakan dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

- Agent of Service

Penawaran jasa juga menjadi salah satu hal penting bagi bank selain menghimpun dan menyalurkan dana. Hal ini berhubungan erat dengan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkan berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 terdapat adanya perbedaan pada jenis bank. Perbedaan dapat dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikan, dan segi menentukan harga yaitu :

1. Segi Fungsi

Bila dari segi fungsi maka Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 jenis perbankan yang dilihat dari fungsinya terdiri dari dua yaitu :

- Bank Umum merupakan kegiatan yang didalamnya melakukan kegiatan usahanya secara umum dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya memberikan jasa untuk pembayarannya. Sehingga bank ini dalam kegiatannya akan menggunakan prinsip syariah didalam pelaksanaannya memberikan jasa untuk pembayaran.
- Bank Perpendanaan Rakyat merupakan kegiatan yang didalamnya melakukan kegiatan usahanya secara umum dan berdasarkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya memberikan jasa untuk pembayarannya. Sehingga bank ini dalam kegiatannya akan menggunakan prinsip konvensional didalam pelaksanaannya memberikan jasa untuk pembayaran.

## 2. Segi Kepemilikan

Bila dari segi kepemilikan maka bank dimiliki oleh sebuah pihak dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan yaitu :

- Bank Milik Pemerintah dilihat dari akta pendirian hingga modal dari pihak pemerintah sehingga semua keuntungan yang diterima akan kembali lagi kepada pihak pemerintah.
- Bank Milik Swasta bisa berupa keseluruhan atau sebagian dari besarnya dimiliki oleh pihak swasta nasional serta

akta pendiriannya dimiliki oleh pihak swasta sehingga keuntungan yang diterima akan kembali lagi kepada pihak swasta.

- Bank Milik Asing merupakan anak perusahaan dari bank luar negeri yang mendirikan bank di nasional bisa berupa bank pemerintah maupun bank swasta.

### 3. Segi Status

Bila dari segi status maka pembagiannya berdasarkan pada kedudukan atau status bank tersebut. Pembagian ini ada karena menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan.

Didalam segi status ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri dan berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- Bank non devisa merupakan bank yang belum diperbolehkan seperti bank devisa sehingga dalam bentuk transaksinya tidak diperbolehkan seperti bank devisa.

Bila bank dilihat dari cara menentukan harga maka bank dibagi menjadi dua yaitu :

- Bank berdasarkan prinsip konvensional maka metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga (*spread base*) dan metode menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan (*fee base*).
- Bank berdasarkan prinsip syariah maka perjanjian sesuai dengan syariah Islam antara bank dengan pihak lain untuk dana yang disimpan, pembiayaan usaha atau kegiatan lain. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtana*).

Peraturan Bank Indonesia didalam perbankan bahwa Bank Konvensional dapat mengkonversi menjadi Bank Syariah namun untuk Bank Syariah tidak diperbolehkan untuk mengkonversi menjadi Bank Konvensional. Bila Bank Konvensional telah mengkonversi menjadi Bank Syariah maka tidak diperbolehkan ulang untuk mengkonversi menjadi Bank Konvensional kembali.

### 2.1.3 Bank Syariah

Dilihat dari kelembagaannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang kemudian membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam usahanya. Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berkembang semakin pesat dengan berdirinya Bank Syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*). Sehingga dengan adanya Undang-Undang baru ini merupakan sebuah jawaban atas permintaan konsumen yang membutuhkan system perbankan alternative yang tidak hanya menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat namun juga memnuhi adanya prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang tidak membebankan biaya kepada para nasabahnya. Bank syariah tidak menerima bunga baik dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang akan dibayarkan kepada penyimpan dana yang ada di bank syariah. Bentuk-bentuk yang ada didalam bank syariah berupa titipan dan investasi dari pihak-pihak pemilik dana. Sehingga dalam pelaksanaannya imbalan yang diberikan berupa bentuk bagi hasil dan/atau bentuk lain sesuai dengan syariah Islam karena mengacu pada hukum Islam. Menurut Undang-Undnag Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011).

Pada pernyataan bagi hasil di dalam Bank Syariah dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana (*shahibul maal*) dari pemilik dana (*mudharib*) kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan tertentu menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bila terdapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan namun bila terjadi kerugian akan dibebankan hanya kepada pemilik harta saja.

*Musyarakah* dapat diartikan sebagai penanaman dana yang berasal dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu. pembagian yang dilakukan dengan membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bila terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan dana/modal masing-masing.

Dengan melihat kinerja bank syariah dan bank konvensional di Malaysia dan menemukan ukuran yang tepat serta bila dilihat dari ROA dan ukuran untuk kinerja bank syariah dengan bank konvensional sebanding (Wasiuzzaman and Nair Gunasegavan, 2013) .

Adanya Bank Syariah di Indonesia bertujuan sebagai perwujudan dari sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian, selain itu bertujuan untuk mendukung sektor riil secara nyata dilihat dari kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-

menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

#### 2.1.4 *Risk Profile*

*Risk Profile* melekat kepada risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan berupa risiko pembiayaan dan risiko likuiditas.

- a. Pembiayaan merupakan kemungkinan debritur atau penerbit dari instrument keuangan secara individu, perusahaan, atau Negara yang tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan yang diterima debritur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank. Sehingga bila pembayaran tertunda atau tidak dilakukan akan menyebabkan permasalahan arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank dan menjadi penyebab utama kegagalan bank.

Didalam bank syariah tidak diperbolehkan untuk menagih bunga tertangguh atau mengenakan denda dengan pengecualiaan adanya penundaan yang disengaja. Karena bila adanya penundaan maka modal bank akan

tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif dan deposan-nasabah tidak akan mendapatkan penghasilan apapun. Untuk mengatasinya maka bank syariah mengandalkan jaminan dan janji yang dilakukan sebelum memulai transaksi perjanjian penjualan dengan biaya dan tambahannya yang kana digunakan untuk membeli komoditas (*murabahah*).

Pada risiko pembiayaan ini akan menggunakan *Non Performing Financing*. Untuk menilai kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan dilihat dari penilaian kualitas aset. Sehingga *Non Performing Financing* dapat menjadi indikasi masalah yang berada didalam bank karena *Non Performing Financing* dikenal sebagai pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki bank. Pada perhitungan *Non Performing Financing* bisa dilihat dari pembiayaan bermasalah yang terjadi dibagi dengan total pembiayaan dikalikan seratus persen.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, bahwa risiko pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 5%.

Berikut merupakan peringkat NPF berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP/2011) yaitu :

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$< 2\%$
2	Baik	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Baik	$8 \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Baik	$\text{NPF} \geq 12\%$

- b. Likuiditas dapat memperlihatkan kemampuan bank dalam memenuhi adanya penarikan simpanan dan liabilitas lain dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dana bagi portofolio pinjaman dan investasi. Likuiditas juga untuk mengimbangi fluktuasi neraca yang tidak terduga maupun terduga tidak lain untuk menyediakan dana bagi pertumbuhan.

Kebutuhan likuiditas dilihat dari jangka waktu yang didalamnya terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan. Karena arus kas masuk dan arus kas keluar dapat membantu memberikan titik awal untuk mengukur kelebihan atau kekurangan likuiditas bank di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu maka bank harus memikirkan

jalan kedepan untuk memenuhi kebutuhan yang ada dengan cara mencari aset yang likuid. Selain itu juga akan membantu bank dalam peminjaman jangka pendek atau liabilitas jangka pendek.

Risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Didalam Bank Syariah terdapat dua masalah dalam risiko likuiditas yaitu kurangnya likuiditas di pasar berarti aset yang tidak likuid ini akan menyulitkan lembaga keuangan dalam memenuhi liabilitas dan kewajiban keuangan dan kurangnya akses pendanaan berarti adanya kelemahan lembaga keuangan dalam meminjamkan atau mengumpulkan dana dengan biaya yang wajar ketika diperlukan.

Pada risiko likuiditas ini akan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain agar mampu memenuhi permohonan peminjam (*loan request*) nasabahnya. *Loan to Deposit Ratio* dapat meningkatkan pendapatan dan membuat kesehatan bank semakin baik (Rizkiyah Suhadak Khabibatur, 2017). Pada perhitungan *Financing to Deposit Ratio* dapat dihitung dengan melihat

pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga dari bank tersebut dikalikan seratus persen.

Untuk itu batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* pada kisaran 80% sampai 110%. Bila angka dari rasio *Financing to Deposit Ratio* berada dibawah standar maka bisa diartikan bahwa bank tidak mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Bila angka dari rasio *Financing to Deposit Ratio* berada di atas 110% maka total pembiayaan yang diberikan melebihi dana yang dihimpun. Sehingga rasio *Financing to Deposit Ratio* berada pada standar yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia akan menghasilkan keuntungan yang mengingkat (asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaan secara efektif).

Berikut merupakan peringkat FDR berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP/2011) yaitu:

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$50\% < \text{FDR} < 75\%$
2	Baik	$75\% < \text{FDR} < 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < \text{FDR} < 100\%$

4	Kurang Baik	100% < FDR <120%
5	Tidak Baik	> 102%

### 2.1.5 Good Corporate Governance

*Corporate Governance* berhubungan dengan sistem dan mekanisme yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas antara para pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Untuk *Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas untuk tujuan utama yaitu mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder*.

*Good Corporate Governance* merupakan *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan memperhatikan kerangka peraturan sebagai peningkatan kinerja keuangan. Selain itu *Good Corporate Governance* juga digunakan untuk meningkatkan nilai dari suatu perusahaan sehingga mampu menarik lebih banyak peminat. *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip didalam penilaiannya terdapat transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Didalam penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 dikemukakan bahwa :

1. Transparasi (*transparency*)

Dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam mengemukakan informasi harus tepat waktu dan akurat. Berbagai macam informasi yang perlu disampaikan yaitu informasi berupa keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan bank.

Yang perlu diimplementasikan dalam prinsip transparasi yaitu :

- *Stakeholder* (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam mengambil keputusan manajerial bank.
- Pemegang saham mendapatkan informasi keuangan bank yang relevan secara berkala dan teratur.
- Pemimpin, manajer, dan karyawan melakukan keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan.

- Menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha ke public secara rutin, maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang.
- Auditor eksternal, komite audit, dan auditor internal memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
- Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional bank telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan.
- Informasi dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak didalam dan oleh unit-unit terkait diluar bank tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja.

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan yang dilakukan berjalan efektif. Manajemen bank harus memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholder*. Untuk dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Bila komisaris bertanggung jawab untuk pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan bank agar tujuan bank tercapai. Pemegang saham yang

bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan bank.

Yang perlu diimplementasikan dalam prinsip akuntabilitas yaitu :

- Pimpinan dan karyawan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional bank.
- Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
- Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit kerja telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bank.
- Didalam proses dalam pengambilan keputusan mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah ditentukan.
- Proses *check and balance* telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit kerja.
- System yang digunakan untuk penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah ditetapkan, diterapkan, dan dilakukan evaluasi dengan baik.
- Pertanggungjawaban kinerja manajemen bank dilakukan secara rutin.

- Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik.

### 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Dapat diartikan sebagai kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Manajemen bank harus berusaha agar tidak menggunakan biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga ataupun pihak diuar kesepakatan seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank.

Yang perlu diimplementasikan dalam prinsip pertanggungjawaban yaitu :

- Pemimpin dan karyawan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan bank yang berlaku.
- Pemimpin dan karyawan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan bank.
- Proses pengambilan keputusan yang mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang diterapkan.
- Pemimpin dan karyawan bekerja sesuai dengan prosedur, standar operasional dan ketentuan lain.
- Upaya dari unit kerja organisasi untuk menghindari potensi merugikan bank dan *stakeholder*.

- Proses pendelegasian kewenangan dijalankan dengan baik untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan baik.
- Pemimpin dan unit kerja telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.

#### 4. Kemandirian (*independency*)

Dapat diartikan sebagai pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga secara tidak langsung perusahaan harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Yang perlu diimplementasikan dalam prinsip kemandirian yaitu :

- Keputusan manajemen bank hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan bank.
- Proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif untuk kepentingan bank.

#### 5. Kewajaran (*fairness*)

Dapat diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pihak perusahaan. Dapat dikatakan setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung ketidakcocokan kepentingan yang bersifat merugikan.

Yang perlu diimplementasikan dalam prinsip kewajaran yaitu :

- Manajemen bank dan karyawan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
- Perlakuan adil dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada *stakeholder* (nasabah, pelanggan, pemilik).
- Manajemen bank dan kepala unit kerja serta karyawan harus membedakan kepentingan bank dan kepentingan organisasi.
- Perlakuan, pengembangan kerja kelompok, hubungan kerja, dan pembinaan pada para karyawan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

Didalam suatu organisasi atau perusahaan perlu memahami dan mengerti dari setiap prinsip yang dikatakan sebagai *Good Corporate*

*Governance* agar suatu perusahaan dapat dikendalikan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Karena *Good Corporate Governance* merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah yang dikelola dengan baik, professional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lain.

Berikut merupakan peringkat GCG berdasarkan ketentuan Lampiran III.3 SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yaitu:

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$NK < 1,5$
2	Baik	$1,5 < NK < 2,5$
3	Cukup Baik	$2,5 < NK < 3,5$
4	Kurang Baik	$3,5 < NK < 4,5$
5	Tidak Baik	$4,5 < NK < 5$

Berikut merupakan 11 Asepek Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Lampiran III.3 SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 :

<b>No</b>	<b>Aspek Yang Dinilai</b>	<b>Bobot %</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,5%

2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	17,5%
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	10%
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	10%
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5%
6	Penanganan benturan kepentingan	10%
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
8	Penerapan fungsi audit intern	5%
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5%
10	Batas maksimum penyaluran dana	5%
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15%

### 2.1.6 *Earnings*

*Earnings* merupakan alat ukur dalam mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Karena tujuan utama dari bank adalah untuk memperoleh keuntungan, maka salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu bank dengan mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan. Sehingga *earnings* digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang telah terkumpul untuk digunakan atau diinvestasikan pada suatu tempat yang produktif.

Pada bank yang berbeda memiliki kebijakan yang berbeda-beda pula dalam menentukan harta yang produktif. Namun tidak terlepas

dari prinsip utama dari adanya bank yaitu menghasilkan bunga maupun deviden. *Earnings* dapat digunakan sebagai evaluasi *earnings*, sumber-sumber *earnings*, kesinambungan *earnings* dan manajemen *earnings*. Alat ukur yang digunakan di dalam *earnings* adalah *Return on Assets* (ROA).

*Return on asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perbankan. Bila *Return on asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga semakin besar sehingga bila dilihat dari pengguna aset juga semakin baik. *Return on asset* (ROA) merupakan sebuah suatu rasio yang bisa digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan dengan mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Rosada, 2013).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 bahwa *Return on asset* (ROA) merupakan perbandingan dari laba sesudah pajak dengan rata-rata total aset. Laba sebelum pajak merupakan hasil dari laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional bank sesudah pajak. Sedangkan total aset yang digunakan adalah jumlah asset-aset produktif dari penempatan surat-surat berharga seperti sertifikat bank Indonesia, surat berharga pasar uang, penempatan pada saham perusahaan lain, penempatan pada *call money* atau *money market* dan penempatan dalam bentuk pembiayaan (Dendawijaya, 2001).

*Return on asset* (ROA) bisa digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode. Bagi investor *Return on asset* (ROA) merupakan imbal hasil investasi karena pada aset modal sering kali merupakan investasi terbesar dari kebanyakan perusahaan.

Berikut merupakan peringkat ROA berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP/2011) yaitu:

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$ROA > 1,5\%$
2	Baik	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Baik	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Baik	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Baik	$ROA \leq 0\%$

### 2.1.7 *Capital*

*Capital* merupakan suatu penilaian dalam mengevaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Tujuannya untuk mengetahui modal yang digunakan suatu perusahaan sudah mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan secara efisien atau ada tidaknya kerugian yang dapat dihindari. Dengan kata lain

modal digunakan untuk membiayai aset penghasil-laba dan pelindung stabilitas.

Bila dilihat dari efisiensi dan pengembalian maka modal akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggaling dana dengan keuntungan yang didapatkan para pemegang saham. Bila dilihat dari stabilitas maka dapat menahan kerugian usaha dan mempertahankan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Rasio yang digunakan didalam Capital ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan cara perhitungan dengan modal bank yang digunakan dibagi dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan seratus persen. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko misalkan pembiayaan.

Modal merupakan faktor penting bank dalam mengmebangkan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 bahwa kewajiban menyediakan modal minimum sebesar 8% dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) digunakan untuk perhitungan kebutuhan modal minimum mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif.

Berikut merupakan peringkat CAR berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP/2011) yaitu :

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$CAR \geq 12\%$
2	Baik	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Baik	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Baik	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak Baik	$CAR \leq 6\%$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 9 ayat 2 peringkat komponen dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komponen 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat baik sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komponen 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum baik sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komponen 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup baik sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komponen 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang baik sehingga dinilai kurang mampu menghadapi

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Peringkat Komponen 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak baik sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor internal lainnya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

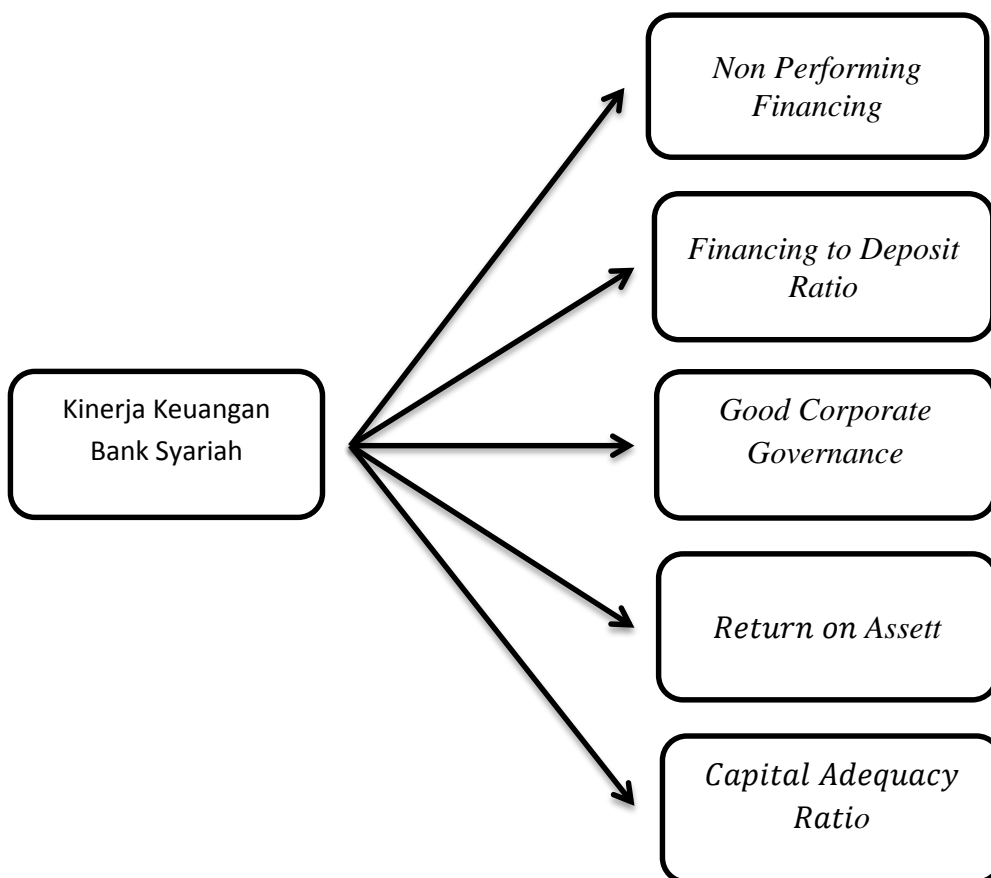
Penelitian yang dilakukan oleh P.K Aspal (2014) dengan Judul “Financial Performance Assessment of Banking Sector in India” menunjukkan bahwa didalam penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Bank yang memiliki kinerja keuangan yang buruk sehingga perlu memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, efisiensi manajemen, likuiditas dan sensitivitas agar memiliki kinerja keuangan yang bagus.

Pada penelitian yang dilakukan oleh R. A. Rahman dan M. Y. Masngut (2014) dengan judul “The Use of CAMELS in Detecting” menunjukkan bahwa didalam penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Bank Islam yang berada di Malaysia menunjukkan bahwa CAMELS merupakan pengukuran yang baik untuk mengetahui *financial distress* bank syariah. Maka dari itu CAMELS bagus untuk meramalkan kinerja dan efisiensi untuk masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muljawan, *et.all* (2014) bahwa studi empiris terkait faktor yang mempengaruhi efisiensi operasional bank,

diantaranya *Return On Asset* (ROA) proksi profitabilitas bank, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan Deposit Ratio* (LDR) proksi likuiditas, *Non Performing Loan* (NPL) proksi risiko pembiayaan, kemudian pertumbuhan GDP riil, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah terhadap dollar, total aset, tipe bank, pengeluaran operasional, *Net Interest Margin* (NIM), pangsa pasar, pembiayaan, tingkat inflasi, dan kualitas produk. Pada penelitian menemukan faktor yang berpengaruh secara positif dan negatif terhadap efisiensi perbankan menggunakan metode kuantitatif.

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### 3.1.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan objek yang akan diteliti bisa berupa kumpulan orang seperti individu, kelompok, komunitas, masyarakat dan kumpulan benda seperti jumlah gedung/ bangunan, tempat. Populasi juga dapat dikatakan ada kesamaan hal yang membentuk suatu masalah pokok di dalam suatu riset khusus.

Penelitian kali ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode tahun 2012-2016.
2. Bank syariah yang mempublikasikan laporan GCG tahunan periode tahun 2012-2016.

##### 3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian yang terdapat pada populasi untuk mewakili secara keseluruhan. Penelitian ini akan lebih fokus kepada Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan melihat kriteria yang

sudah disebutkan, karena tidak semua bank syariah di Indonesia memenuhi kriteria. Di Indonesia terdapat 11 Bank Syariah.

## **3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Data dan Sumber Data**

Data merupakan suatu keterangan, gambaran tentang sesuatu atau fakta lewat angka, simbol, kode dan lainnya. Data yang ada akan digunakan peneliti dalam mengambil keputusan yang tepat. Data yang akan digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan GCG tahunan. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak perantara.

Sumber data merupakan sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang akan digunakan bersifat kuantitatif yang akan berisi data statistik atau data lain yang berupa angka-angka dan juga kualitatif yang berisi keterangan yang bukan berupa angka-angka.

Data ini akan didapatkan pada situs resmi masing-masing Bank Syariah baik di Indonesia. Selain itu data yang akan digunakan adalah laporan keuangan dan laporan GCG dari tahun 2012-2016.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Syariah pada tahun 2012-2016. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Data tersebut diperoleh melalui *website* perusahaan yang dimiliki oleh masing-masing Bank Syariah yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Literatur yang digunakan bisa menggunakan buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan beberapa sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan yang akan digunakan sebagai sumber pengumpulan data.

Setelah itu akan dilanjutkan dengan mengumpulkan sampel perusahaan yang akan dijadikan subjek penelitian, maka akan dilakukan penilaian terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan menghitung satu per satu variabel berupa NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR.

Dengan sampel yang diambil yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan GCG Tahunan Bank Syariah secara berturut-turut dari 2012-2016 pada masing-masing perusahaan yang menjadi sampel. Setelah data yang dibutuhkan lengkap maka akan dimasukkan kedalam data induk.

### 3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

#### 3.3.1 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Good Corporate Governance*, *Return on Assett*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

##### 3.3.1.1 *Non Performing Financing*

*Risk Profile* akan dihitung dan dilihat dari NPF yang merupakan cerminan dari risiko pembiayaan, bila NPF kecil maka semakin kecil pula risiko yang diterima oleh pihak bank sehingga tingkat kebangkrutan bank juga semakin kecil.

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

##### 3.3.1.2 *Financing to Deposit Ratio*

*Risk Profile* juga akan dihitung dan dilihat dari FDR akan digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan, semakin tinggi FDR maka kinerja keuangan bank semakin baik dikarenakan pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar sehingga pendapatan bertambah dan kesehatan bank juga akan semakin baik.

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

##### 3.3.1.3 *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* akan menilai kinerja keuangan bank dengan melihat skor komposit yang dimiliki oleh bank tersebut. Bila nilai komposit kecil maka kualitas manajemen bank tersebut sangat baik sehingga bank tersebut dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Dengan melihat :

- Transparansi (*transparency*)

Dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam mengemukakan informasi harus tepat waktu dan akurat. Berbagai macam informasi yang perlu disampaikan yaitu informasi berupa keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan bank.

- Akuntabilitas (*accountability*)

Dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan yang dilakukan berjalan efektif. Manajemen bank harus memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dan *stakeholder*. Untuk dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan bank dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan oleh pemegang saham. Bila komisaris bertanggung jawab untuk pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan bank agar tujuan bank tercapai. Pemegang saham yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan bank.

- Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Dapat diartikan sebagai kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Manajemen bank harus berusaha agar tidak menggunakan biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga ataupun pihak diuar kesepakatan seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank.

- Kemandirian (*independency*)

Dapat diartikan sebagai pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga secara tidak langsung perusahaan harus memberikan pengakuan

terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

- Kewajaran (*fairness*)

Dapat diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pihak perusahaan. Dapat dikatakan setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung ketidakcocokan kepentingan yang bersifat merugikan.

Berikut merupakan peringkat GCG berdasarkan ketentuan Lampiran III.3 SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yaitu:

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Baik	$NK < 1,5$
2	Baik	$1,5 < NK < 2,5$
3	Cukup Baik	$2,5 < NK < 3,5$
4	Kurang Baik	$3,5 < NK < 4,5$
5	Tidak Baik	$4,5 < NK < 5$

Berikut merupakan 11 Asepek Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Lampiran III.3 SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot %
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,5%
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	17,5%
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	10%
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	10%
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5%
6	Penanganan benturan kepentingan	10%
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
8	Penerapan fungsi audit intern	5%
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5%
10	Batas maksimum penyaluran dana	5%
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15%

#### 3.3.1.4 *Earnings*

*Earnings* akan dihitung dengan menggunakan ROA untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola asset untuk mencapai keuntungan. Bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai oleh suatu bank juga

semakain besar. ROA merupakan rasio yang akan digunakan untuk mengukur profitabilitas perbankan. Berdasar SE Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 berikut rumus menghitung ROA.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – Rata Tota Aset}} \times 100\%$$

### 3.3.1.5 *Capital*

*Capital* akan dihitung dengan menggunakan CAR untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank dalam meminimalisir risiko kegagalan pembiayaan. Bila CAR semakin tinggi maka kinerja keuangan semakin sehat.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

## 3.4 Metode Analisis Data

Pada metode analisis data menggunakan analisis diskriptif dengan menggunakan beberapa langkah yaitu berupa:

### 1. Menghitung rasio keuangan

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan dirasa cukup serta juga telah menentukan variabel yang digunakan beserta rasio yang juga sudah ditentukan maka sudah dapat melakukan perhitungan sesuai dengan langkah yang telah direncanakan. Menghitung satu per satu sesuai rasio yang ditentukan berupa

NPF, FDR, GCG, ROA dan CAR pada masing-masing Bank Syariah.

## 2. Menganalisis hasil perhitungan

Setelah dilakukan perhitungan akan dilakukan analisis hasil dari perhitungan dengan melihat ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga dengan ini akan melihat kinerja keuangan antara bank satu dengan bank yang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Bank Syariah perlu mengetahui penilaian terhadap kemampuan bank dalam menjalankan operasional perbankan secara normal dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga penilaian sangat penting karena untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan hak bank yang benar-benar baik dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan beberapa faktor indikator yang baik atau tidaknya suatu bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian kesehatan bank meliputi faktor–faktor yang sudah di perbaharui.

#### **4.1 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari *Non Performing Financing***

Untuk mengetahui risiko pembiayaan pada penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pada rasio ini akan melihat dari segi pembiayaan yang bermasalah antara pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong lancar, diragukan dan macet kemudian dibagi dengan total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, bahwa risiko

pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 5%. Semakin tinggi Rasio NPF yang dihasilkan maka kinerja keuangan suatu bank semakin tidak baik terdapat indikasi masalah pada pembiayaan macet. Bila pembayaran tertunda atau tidak dilakukan akan menyebabkan permasalahan arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank dan menjadi penyebab utama kegagalan bank. Karena bila adanya penundaan maka modal bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif dan depositan-nasabah tidak akan mendapatkan penghasilan apapun.

Perhitungan Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

No	Nama Bank	Rasio NPF					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,82	4,32	6,84	6,06	4,92	4,99
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	2,09	4,69	6,55	7,11	3,83	4,85
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	2,67	2,99	3,89	4,26	3,30	3,42
4	PT Bank Syariah BNI	2,02	1,86	1,86	2,53	2,94	2,24
5	PT Bank Syariah BRI	1,78	1,55	1,69	2,02	2,03	1,81
6	PT Bank Syariah Bukopin	4,59	4,27	4,07	2,99	3,17	3,82
7	PT Bank Jabar dan Banten	4,46	1,86	5,84	6,93	17,91	7,40
8	PT Bank Panin Syariah	0,20	1,02	0,53	2,63	2,26	1,33
9	PT Bank Victoria Syariah	3,19	3,71	7,10	9,80	7,31	6,22
10	PT BCA Syariah	0,10	0,10	0,10	0,70	0,50	0,35

11	PT Maybank Indonesia	2,49	2,69	5,04	35,15	43,99	17,87
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>4,94</b>					

Berdasarkan perhitungan NPF yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai Rasio NPF sebesar 6,84% pada tahun 2014 dikarenakan menurunnya kondisi usaha nasabah sehingga tidak mampu membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu langkah konsolidasi (penggabungan perusahaan menjadi satu nama perusahaan yang baru) internal bank syariah besar dengan didukung adanya kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif. Pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sehingga Rasio NPF sebesar 4,92% pada tahun 2016 dikarenakan kualitas pembiayaan Bank sedikit mengalami perbaikan karena kemungkinan nasabah dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya didukung dengan kemungkinan yang baik pada bisnis yang dijalani oleh nasabah. Pada tahun 2012, 2013 dan 2016 PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% namun pada tahun 2014 dan 2015 berada di atas batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 terdapat

indikasi masalah pada pembiayaan macet. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 4,99% masih berada di atas rata-rata industri yaitu 4,94% namun tidak tinggi yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 kurang baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki NPF yang cenderung mengalami peningkatan maka akan memberikan pengaruh yang cenderung negatif terhadap modal yang dimiliki bank. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet yang terdapat penundaan sehingga modal yang dimiliki bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif.

## 2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase dan memiliki perbedaan yang jauh pada periode tertentu. Pada tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai Rasio NPF sebesar 7,11% di tahun 2015 karena adanya penurunan tingkat pembiayaan yang dilakukan dengan bank sedangkan kemungkinan nasabah tidak dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sehingga Rasio NPF sebesar 3,84% karena bank dapat mempertahankan kinerja bank yang cukup baik dengan cara mengintensifkan strategi efisiensi biaya melalui penutupan

cabang-cabang yang kurang produktif, mengurangi jumlah ATM. Sehingga kinerja bank berjalan kondusif dan berjalan sesuai tujuan awal. Pada tahun 2012 dan 2016 PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% namun pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berada di atas batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sehingga terdapat indikasi masalah pada pembiayaan macet. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 4,85% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% namun tidak terlalu tinggi yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase dengan beberapa periode yang meningkat jauh maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap modal yang dimiliki bank. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet yang terdapat penundaan sehingga modal yang dimiliki bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif.

### 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan

hingga mencapai Rasio NPF sebesar 4,26% di tahun 2015 disebabkan oleh terkendalanya nasabah dalam pembayaran pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati karena kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sehingga Rasio NPF sebesar 3,30% karena Bank fokus kepada menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian yang sangat selektif dan *prudent* serta memaksimalkan *account monitoring* agar penyelesaian terhadap pembiayaan macet sehingga dapat diatasi sesegera mungkin. Setiap tahunnya PT Bank Syariah Mega Indonesia masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 3,42% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang tidak terlalu signifikan dan cenderung rendah maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap modal yang dimiliki bank. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank tidak akan tertahan sehingga kegiatan berjalan produktif

#### 4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang tidak terlalu signifikan hingga pada periode tertentu memiliki prosentase yang sama. Pada tahun 2012 – 2014 mengalami penurunan dan berada pada Rasio NPF sebesar 1,86% pada tahun 2013 dan 2014 karena peningkatan kualitas sistem pembiayaan yang dicapai terutama melalui upaya Bank yang terus menerus menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, memperbaiki sistem pengelolaan pembiayaan, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap debitur yang ada terutama dalam membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati, lalu pada tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan sehingga Rasio NPF sebesar 2,94% di tahun 2016 karena adanya penurunan pertumbuhan pembiayaan macet artinya bank tidak mendapat jaminan yang baik untuk nasabah tentang membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati. Setiap tahunnya PT Bank Syariah BNI masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 2,24% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah

BNI memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang tidak terlalu signifikan maka akan memberikan pengaruh positif. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

#### 5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase cenderung meningkat namun tidak signifikan. Rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 1,55% karena adanya kenaikan pembiayaan sehingga dapat menambah peluang untuk calon nasabah yang baru dan menggiatkan pendekatan persuasif terhadap nasabah sehingga diharapkan nasabah dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati. Rasio NPF terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 2,03% adanya kenaikan pembiayaan sehingga dapat menambah peluang untuk calon nasabah yang baru namun tidak sebaik pada tahun 2013 dalam efisiensi penggunaannya. Setiap tahunnya PT Bank Syariah BRI masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 1,81% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan

bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah BRI memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase cenderung meningkat namun tidak signifikan maka akan memberikan pengaruh positif. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

#### 6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun namun tidak signifikan. Rasio NPF terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 4,59% karena kualitas pembiayaan yang disalurkan kurang baik tidak terpantau secara periodik sehingga kemungkinan nasabah tidak dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati dan Rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 2,99% dengan kualitas pembiayaan yang disalurkan ada kelebihan yaitu sedikit lebih baik dari pada tahun – tahun sebelumnya dengan kemungkinan nasabah dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati. Setiap tahunnya PT Bank Syariah Bukopin masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 3,82% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari

rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun namun tidak signifikan maka akan memberikan pengaruh positif. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

#### 7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung naik dan signifikan perubahan yang terjadi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat bagus hingga pada tahun 2013 mencapai Rasio NPF sebesar 1,86% dikarenakan bank mampu menjaga ketidakstabilan perekonomian Indonesia sehingga kondisi keuangan nasabah membaik namun pada tahun 2013 – 2016 terus mengalami peningkatan sehingga prosentase Rasio NPF sebesar 17,91% pada tahun 2016 dikarenakan ketidakstabilan perekonomian Indonesia akibat lesunya perekonomian global yang berdampak pada bisnis pembiayaan nasabah sehingga kondisi keuangan nasabah menurun. Pada tahun 2012 dan 2013 PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% namun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berada di atas batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sehingga terdapat indikasi masalah pada pembiayaan macet. Dari data yang

sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 7,40% berada di atas rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat tidak baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Victoria Syariah memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat secara signifikan maka akan memberikan pengaruh negatif. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet sehingga modal yang dimiliki bank akan bertambah.

#### 8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase namun masih pada rasio yang cenderung kecil. Rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 0,20% dikarenakan perekonomian Indonesia yang stabil serta pembiayaan PT Bank Panin Syariah yang didominasi oleh segmen usaha kecil dan menengah, mampu mengeksekusi rencana bisnis bank dengan baik dan menghasilkan peningkatan *volume* pembiayaan secara signifikan, Rasio NPF terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 2,63% karena adanya kenaikan pembiayaan pada sektor UMKM Indonesia. Setiap tahunnya PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data

yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 1.33% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Panin Syariah memiliki NPF yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung meningkat namun masih berada dibawah rata-rata industri maka akan memberikan pengaruh positif. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

#### 9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat. Pada tahun 2012 - 2015 terus mengalami kenaikan prosentase Rasio NPF hingga mencapai Rasio NPF sebesar 9,80% pada tahun 2015 karena Kondisi makro ekonomi yang melemah menunjukkan Kondisi makro yang tidak kondusif mengakibatkan pertumbuhan industri perbankan syariah tidak signifikan sehingga pertumbuhan pembiayaan juga tidak baik pembiayaan baru tidak naik sementara pembiayaan lama yang bermasalah meningkat. Rasio NPF mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 7,31% karena pertumbuhan industri perbankan syariah mengalami pergerakan kearah yang positif sehingga pembiayaan juga mulai bergerak kearah yang positif

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 dan 2013 PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% namun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berada di atas batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sehingga terdapat indikasi masalah pada pembiayaan macet. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 6.22% berada di atas rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat tidak baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Bank Victoria Syariah memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat maka akan memberikan pengaruh negatif. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet sehingga modal yang dimiliki bank akan bertambah.

#### 10. Pada PT BCA Sayriah

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang tidak signifikan. Pada tahun 2012 - 2014 memiliki Rasio NPF sebesar 0,10% yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0,70% karena dampak langsung dari melemahnya perekonomian domestik sehingga banyak pelaku usaha yang mengalami perlambatan performa bisnisnya sehingga akhirnya

mempengaruhi kualitas pembayaran kepada bank namun masih pada kebijakan penyaluran pembiayaan yang diimplementasikan dengan baik dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,50% karena adanya pertumbuhan pembiayaan namun tetap menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setiap tahunnya PT BCA Sayriah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% dari tahun 2012 - 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 0.35% berada di bawah rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT BCA Sayriah memiliki NPF yang mengalami fluktuatif prosentase yang tidak signifikan maka akan memberikan pengaruh positif. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

#### 11. PT Maybank Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan prosentase yang sangat signifikan pada periode tertentu. Rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 2,49% karena pembiayaan yang dilakukan oleh bank dapat disebarkan ke berbagai sektor riil seperti manufaktur, perkebunan,

kelistrikan/gas/air, transportasi/komunikasi dan konstruks. Rasio NPF terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 43,99% karena menurunnya kualitas *account* akibat krisis ekonomi tahun sebelumnya yang memberikan dampak negatif terhadap segmen korporasi serta pengurangan modal dengan kemungkinan nasabah tidak dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015 masih berdampak untuk tahun 2016. Pada tahun 2012 dan 2013 PT Bank Panin Syariah masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5% namun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berada di atas batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sehingga terdapat indikasi masalah pada pembiayaan macet. Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata Rasio NPF sebesar 17.87% berada di jauh diatas rata-rata industri yaitu 4,94% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2012 – 2016 sangat tidak baik dilihat dari rata-rata industri. Artinya *Non Performing Financing* (NPF) yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah akan berpengaruh kepada modal yang dimiliki oleh bank dan pada PT Maybank Indonesia memiliki NPF yang mengalami peningkatan prosentase yang sangat signifikan pada periode tertentu maka akan memberikan pengaruh negatif. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet sehingga modal yang dimiliki bank akan bertambah.

#### 4.2 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari *Financing to Deposit Ratio*

Untuk mengetahui risiko likuiditas pada penelitian ini menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan dana pihak ketiga. Pembiayaan yang diberikan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, dan deposito.

Batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari rasio FDR pada kisaran 80% sampai 110%. Bila rasio FDR berada dibawah standar maka bisa diartikan bahwa bank tidak mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Bila angka dari rasio FDR berada di atas 110% maka total pembiayaan yang diberikan melebihi dana yang dihimpun.

##### Perhitungan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

No	Nama Bank	Rasio FDR					Rata-Rata
		%					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	94,40	89,37	82,13	82,25	79,46	85,52
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	94,15	99,57	83,71	90,30	95,44	92,63

3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	87,41	92,88	92,77	96,71	94,82	92,92
4	PT Bank Syariah BNI	84,99	98,42	92,60	91,94	84,57	90,50
5	PT Bank Syariah BRI	95,43	102,7 0	92,50	84,16	81,42	91,24
6	PT Bank Syariah Bukopin	91,98	100,2 9	92,89	90,56	88,18	92,78
7	PT Bank Jabar dan Banten	99,44	97,40	84,02	104,7 5	99,28	96,98
8	PT Bank Panin Syariah	105,6 6	90,40	94,04	94,81	90,79	95,14
9	PT Bank Victoria Syariah	73,77	84,66	95,11	95,29	100,6 6	89,90
10	PT BCA Sayriah	79,86	82,16	91,17	91,41	90,12	86,94
11	PT Maybank Indonesia	197,7 0	110,5 4	157,7 7	152,8 7	197,7 0	163,32
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>97,99</b>					

Berdasarkan perhitungan FDR yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami penurunan prosentase. Rasio FDR terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 94,40% yang berada diantara batas aman dari FDR karena bank telah melakukan intermediasi dengan baik di mana seluruh dana pihak ketiga (DPK) disalurkan kepada

masyarakat, semakin tinggi penyaluran dana yang diberikan maka meningkatkan peluang untuk mendapatkan return dari penggunaan dana dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaan secara efektif yang artinya penyaluran dana berjalan secara efektif dan Rasio FDR terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 79,46% berada dibawah batas aman bisa jadi bahwa bank kurang mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki Rasio FDR yang mengalami penurunan dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 85,52% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 – 2015, sehingga PT Bank Syariah Mandiri masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun. Namun pada tahun 2016 prosentase Rasio FDR yaitu sebesar 79,46% dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 80% - 110% sehingga PT Bank Syariah Mandiri tidak mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang

membutuhkan biaya sehingga bank dikatakan kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

## 2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2014 Rasio FDR mengalami peningkatan dan penurunan dimana pada tahun 2013 menjadi Rasio FDR terbesar sebesar 99,57% mencerminkan bahwa peningkatan dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berada diantara batas aman dari FDR karena bank telah melakukan intermediasi dengan baik di mana seluruh dana pihak ketiga (DPK) disalurkan kepada masyarakat, untuk mendapatkan return dari penggunaan dana dengan asumsi bank menalurkan pembiayaan secara efektif yang artinya penyaluran dana berjalan secara efektif dan pada tahun 2015 - 2016 mengalami peningkatan namun Rasio FDR hanya sebesar 95,44% pada tahun 2016 sesuai dengan harapan bank yang menginginkan FDR pada 92% - 99% bentuk optimalisasi penyaluran pembiayaan dan antisipasi risiko likuiditas terhadap kondisi eksternal dan internal sehingga semakin tinggi penyaluran dana yang diberikan maka meningkatkan peluang untuk mendapatkan return dari penggunaan dana. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 92,63% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return

dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Syariah Muamalat Indonesia masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

### 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2015 Rasio FDR mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 menjadi Rasio FDR terkecil yaitu sebesar 87,41% dikarenakan PT Bank Syariah Mega Indonesia menghadapi tantangan yaitu dalam pengembangan bisnis mikro dari tahun sebelum - sebelumnya dan juga terdapat kendala pada Sumber Daya Insani yang agak menghambat karena banyak yang keluar sehingga dari segi Sumber Daya Insani tidak berjalan secara optimal namun pada tahun ini bank menggabungkan sejumlah cabang bisnis mikro untuk konsolidasi dan terbukti efektif sehingga Rasio FDR lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rasio FDR terbesar sebesar 96,71% karena PT Bank Syariah Mega Indonesia memfokuskan dalam memaksimalkan perolehan pendanaan berbiaya murah khususnya dari sektor

ritel untuk memperoleh pertumbuhan volume dana pihak ketiga sekaligus dapat meningkatkan kualitas komposisi dana pihak ketiga. Langkah yang dipilih oleh PT Bank Syariah Mega Indonesia dengan menggunakan strategi penghimpunan DPK yang disesuaikan dengan pertumbuhan pembiayaan sehingga fungsi intermediasi tetap terjaga dan pada tahun 2016 mengalami penurunan Rasio FDR menjadi sebesar 94,82%. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 92,92% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Syariah Mega Indonesia masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun dari periode sebelum - sebelumnya. Pada tahun 2012 – 2013 Rasio FDR mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 menjadi

Rasio FDR terbesar sebesar 98,42% karena PT Bank Syariah BNI memfokuskan pada pengembangan sekmen bisnis ritel baik dalam hal penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga dengan melalui layanan kantor cabang BNI Syariah sebanyak 64 Kantor Cabang Utama (KCU), selain itu layanan kantor bisnis BNI Syariah semakin bertambah dengan adanya 161 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 17 Kantor Kas (KK). Untuk menambah pelayanan secara langsung BNI Syariah menambah mobil BNI Syariah Layanan Gerak di tahun 2013 menjadi 22 buah. Pada tahun 2014 - 2016 mengalami penurunan Rasio FDR hanya sebesar 84,57% pada tahun 2016 karena akibat fungsi intermediasi perbankan yang tidak berjalan optimal sehingga mengalami penurunan seiring dengan aktivitas penyaluran pembiayaan perbankan yang secara bertahap juga mengalami perlambatan. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BNI memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 90,50% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Syariah BNI masih

mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami penurunan prosentase. Rasio FDR terbesar terdapat pada tahun 2013 sebesar 102,70% karena pada tahun ini PT Bank Syariah BRI dapat meningkatkan kualitas layanan sebagai prioritas dalam strategi bisnisnya khususnya di tabungan yang didapat dari kontribusi pertumbuhan berbagai produk pendanaan namun juga total pembiayaan yang diberikan mendekati dana yang dihimpun. Rasio FDR terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 81,42% karena ada penurunan rasio kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah serta akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BRI memiliki Rasio FDR yang mengalami penurunan dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 91,24% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 -

2016. Sehingga PT Bank Syariah BRI masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 –2013 Rasio FDR mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 menjadi Rasio FDR terbesar sebesar 100,29% karena bank masih berusaha untuk pengelolaan dana secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga untuk saat ini pengelolaan belum berjalan secara efisien. Pada tahun 2014 - 2016 mengalami penurunan Rasio FDR hanya sebesar 88,18% pada tahun 2016 pada pengembangan produk yang dilakukan oleh bank belum mencapai efisiensi sehingga mengalami penurunan namun untuk dana pembiayaan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 92,78% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang

sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Syariah Bukopin masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

## 7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2016 Rasio FDR mengalami peningkatan dan penurunan setiap pergantian tahun. Dimana pada tahun 2014 menjadi Rasio FDR terkecil sebesar 84,02% karena bank tetap berusaha untuk meningkatkan penghimpunan dana murah yang berasal dari giro dan tabungan melalui pengembangan produk – produk baru berupa jempit masalah, *card* masalah dan *mobile* masalah. Pada tahun 2015 menjadi Rasio FDR terbesar sebesar 104,75% karena pada tahun ini bank berusaha maksimal dalam pendanaan kepada pihak ketiga. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 96,98% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase

standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Jabar dan Banten masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 –2013 Rasio FDR mengalami penurunan, tahun 2014 – 2015 Rasio FDR mengalami peningkatan lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali. Rasio FDR terbesar sebesar 105,66% pada tahun 2012 karena intermediasi yang berjalan dengan efektif didukung dengan nasabah tabungan dan giro sudah dapat menggunakan fasilitas ATM untuk bertransaksi tunai dan non tunai di seluruh jaringan ATM Panin Bank dengan jumlah lebih dari 800 ATM dan ATM Bersama dengan jumlah 42.000 ATM. Rasio FDR terendah hanya sebesar 90,40% pada tahun 2013 karena pertumbuhan DPK yang cenderung tidak seiring dengan pertumbuhan pembiayaan disebabkan oleh persaingan dalam rangka mendapatkan likuiditas dan sifat kehati-hatian nasabah dalam menempatkan dana serta kenaikan suku bunga yang umumnya tidak langsung direspon. Selain itu akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana dan atau akibat perubahan tingkat imbal hasil. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Panin Syariah memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuasi prosentase dan memiliki rata-

rata Rasio FDR sebesar 95,14% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank masih dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110% pada tahun 2012 - 2016. Sehingga PT Bank Panin Syariah masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan prosentase. Pada tahun 2012 menjadi Rasio FDR terkecil hanya sebesar 73,77% merupakan rasio yang lebih baik dari tahun sebelumnya dikarenakan PT Bank Victoria Syariah mulai mengembangkan strategi bisnis bank diarahkan pada segmen mikro dan UMKM yang memiliki peluang pasar yang sangat besar dan akan terus berkembang. Pada tahun 2016 menjadi Rasio FDR terbesar mencapai 100,66% karena akibat dari pengaruh deposito berjangka seiring membaiknya produktivitas dari pendanaan jaringan kantor sehingga Kenaikan Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Victoria Syariah memiliki Rasio FDR yang

mengalami peningkatan prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 89,90% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank berada dalam prosentase dibawah standar pada tahun 2012 yaitu sebesar 73,77%. Namun dari tahun 2013 – 2016 dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110%. Sehingga PT Bank Victoria Syariah masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 menjadi Rasio FDR terkecil hanya sebesar 79,86% karena pertumbuhan pembiayaan juga diiringi dengan terus membaiknya kualitas pembiayaan yang ada dari pada tahun sebelumnya dilihat dari segi menaikan dana murah giro dan tabungan banyak didukung oleh pendirian Unit Layanan Syariah di cabang-cabang PT BCA Syariah yang memiliki potensi tinggi atas produk dan layanan syariah. Pada tahu 2015 menjadi Rasio FDR terbesar mencapai 91,41% karena mampu menjalankan intermediasi dengan baik sehingga penghimpunan dana juga meningkat namun perbedaan yang terjadi

dari tahun sebelumnya juga disebabkan oleh melemahnya perekonomian domestik akibatnya mempengaruhi kualitas pembayaran kepada bank. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT BCA Sayriah memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuatif peningkatan prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 86,94% berada di bawah rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank sudah mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga sudah efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank berada dalam prosentase dibawah standar pada tahun 2012 yaitu pada rasio FDR 79,86%, sehingga pada tahun 2012 PT BCA Sayriah tidak mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Namun dari tahun 2013 – 2016 dalam prosentase standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kisaran 80% - 110%. Sehingga PT BCA Sayriah masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

#### 11. PT Maybank Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase namun cenderung tinggi sehingga melampaui prosentase standar yang sudah di

tetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2012 dan tahun 2016 menjadi Rasio FDR terbesar sebesar 197,70%. Pada tahun 2013 menjadi Rasio FDR terkecil mencapai 110,54% karena pada tahun ini pertumbuhan bank melambat sehingga dana pihak ketiga belum tersampaikan secara efektif. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Maybank Indonesia memiliki Rasio FDR yang mengalami fluktuatif peningkatan prosentase dan memiliki rata-rata Rasio FDR sebesar 163,32% berada di atas rata-rata industri yaitu 97,99% artinya bank belum mencapai efisiensi penyaluran dana pihak ketiga secara efektif dilihat dari rata-rata industri sehingga untuk mendapatkan return dari penggunaan dana juga belum efektif. Artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikenal sebagai ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan arus kas, aset lancar yang sudah dijanjikan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank berada dalam prosentase diatas standar dari tahun 2012 – 2016 berada di atas 110% sehingga total pembiayaan yang diberikan melebihi dana yang dihimpun.

### 4.3 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas untuk tujuan utama yaitu mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder*. *Good Corporate Governance* merupakan *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan memperhatikan kerangka peraturan sebagai peningkatan kinerja keuangan.

Didalam penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 memiliki lima prinsip didalam penilaiannya terdapat transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Bila Rasio GCG semakin besar maka *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan memperhatikan kerangka peraturan sebagai peningkatan kinerja keuangan kurang diterapkan secara maksimal. Sehingga transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) kurang diterapkan secara maksimal. Bila RASIO GCG semakin kecil maka *supervise* atau monitoring kinerja manajemen diterapkan secara maksimal. Sehingga transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) diterapkan secara maksimal.

Perhitungan Rasio *Good Corporate Governance* (GCG)

No	Nama Bank	Rasio GCG					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,25	1,85	2,10	1,50	2,00	1,94
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1,15	1,15	3,00	3,00	2,00	2,06
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	1,60	1,87	2,00	1,54	1,64	1,73
4	PT Bank Syariah BNI	1,25	1,30	2,00	2,00	2,00	1,71
5	PT Bank Syariah BRI	1,38	1,35	1,74	1,61	1,60	1,54
6	PT Bank Syariah Bukopin	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,60
7	PT Bank Jabar dan Banten	3,00	1,78	1,89	2,50	2,58	2,35
8	PT Bank Panin Syariah	1,35	1,35	1,40	2,00	2,00	1,62
9	PT Bank Victoria Syariah	2,07	1,66	1,93	3,00	2,49	2,23
10	PT BCA Sayriah	1,80	1,55	1,00	1,00	1,00	1,27
11	PT Maybank Indonesia	2,30	2,17	2,00	3,00	3,00	2,50
<b>Rata-Rata Industri</b>							<b>1,87</b>

Berdasarkan perhitungan GCG yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. PT Bank Syariah Mandiri

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar

terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 2,25 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 1,50. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki nilai rata-rata yaitu 1,94 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank belum mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah Mandiri belum menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Syariah Mandiri

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang dibentuk telah beranggotakan sesuai dengan persyaratan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris

4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah berjalan sesuai ketentuan. DPS telah memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	BSM telah memiliki kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan yang sesuai dengan ketentuan beraku. Tindakan tegas diterapkan dengan baik oleh manajemen Bank atas setiap pelanggaran benturan kepentingan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	BSM telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. BSM telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	BSM telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan didukung oleh personil yang memiliki kompetensi dibidangnya. Kompetensi dari setiap personil Satuan Kerja Audit Intern terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan usaha Bank
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk memiliki kompetensi yang sesuai dibidangnya dan telah menyampaikan <i>management letter</i> tepat waktu serta mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam memberikan penyaluran dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dengan baik

11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	BSM telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku
----	--	---

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah Mandiri telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparency*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

## 2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Syariah Muamalat Indonesia pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2012 – 2013 yaitu sebesar 3,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2012 - 2013 sebesar 1,15. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki nilai rata-rata yaitu 2,06 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank belum mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia belum menerapkan

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang dibentuk telah beranggotakan sesuai dengan persyaratan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah berjalan sesuai ketentuan. DPS telah memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan dan aturan internal dalam mengatur

		penanganan benturan kepentingan yang sesuai dengan ketentuan beraku. Tindakan tegas diterapkan dengan baik oleh manajemen Bank atas setiap pelanggaran benturan kepentingan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan didukung oleh personil yang memiliki kompetensi dibidangnya. Kompetensi dari setiap personil Satuan Kerja Audit Intern terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan usaha Bank
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk memiliki kompetensi yang sesuai dibidangnya dan telah menyampaikan <i>management letter</i> tepat waktu serta mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam memberikan penyaluran dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut

dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responcibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

### 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Hasil penilaian yang dilakukan tim *selt assessment* PT Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 1,54. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki nilai rata-rata yaitu 1,73 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah Mega Indonesia sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Mega Indonesia dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corpoate Governance* (GCG) PT Bank Syariah Mega Indonesia

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Dewan direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Struktur, komposisi, rangkap jabatan, independensi, tugas dan tanggungjawab komite serta efektivitas rapat komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat serta transparansi DPS Bank Mega Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSM-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS
6	Penanganan benturan kepentingan	Kebijakan benturan kepentingan sudah diatur dalam peraturan perusahaan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independensi terhadap satuan kerja operasional
8	Penerapan fungsi audit intern	Fungsi audit intern telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Bank Mega Syariah telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Batas maksimum penyaluran dana	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik

11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi kondisi bank dan laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> serta kecukupan pelaporan internal bank secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip GCG
----	--	--

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah Mega Indonesia telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responcibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 4. PT Bank Syariah BNI

Hasil penilaian yang dilakukan tim *selt assessment* PT Bank Syariah BNI pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2014 - 2016 yaitu sebesar 2,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 1,25. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah BNI memiliki nilai rata-rata yaitu 1,71 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah

BNI sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah BNI dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Syariah BNI

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Produk yang dimiliki BNI Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN
6	Penanganan benturan kepentingan	BNI Syariah telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan BNI Syariah telah sesuai dengan

		ketentuan yang berlaku
8	Penerapan fungsi audit intern	BNI Syariah telah memiliki standar audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada BNI Syariah tepat waktu
10	Batas maksimum penyaluran dana	BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	BNI Syariah telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang handal

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah BNI telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparency*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan

dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 5. PT Bank Syariah BRI

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Syariah BRI pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,74 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 1,38. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah BRI memiliki nilai rata-rata yaitu 1,54 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah BRI sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah BRI dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Syariah BRI

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan

		prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Produk yang dimiliki Bank Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah memiliki standar audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank tepat waktu
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah BRI telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responcibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 6. PT Bank Syariah Bukopin

Hasil penilaian yang dilakukan tim *selt assessment* PT Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada semua tahun selain tahun 2014 sebesar 1,50. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki nilai rata-rata yaitu 1,60 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Syariah Bukopin sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara

maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Bukopin dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Syariah Bukopin

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Struktur, komposisi, rangkap jabatan, independensi, tugas dan tanggungjawab komite serta efektivitas rapat komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk pernghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank

8	Penerapan fungsi audit intern	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi kondisi bank dan laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> serta kecukupan pelaporan internal bank secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip GCG

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Syariah Bukopin telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparency*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 7. PT Bank Jabar dan Banten

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Jabar dan Banten pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,00 sedangkan untuk nilai komposit

yang terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 1,78. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki nilai rata-rata yaitu 2,35 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank belum mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Jabar dan Banten belum menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Jabar dan Banten dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Jabar dan Banten

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan	Seluruh produk pernghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa

	penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Jabar dan Banten telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responcibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

## 8. PT Bank Panin Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Panin Syariah pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2015 - 2016 yaitu sebesar 2,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2012 – 2013 sebesar 1,35. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Panin Syariah memiliki nilai rata-rata yaitu 1,62 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Panin Syariah sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Panin Syariah dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Panin Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif

	komite	dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Panin Syariah telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparency*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*)

ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 9. PT Bank Victoria Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 1,66. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Bank Victoria Syariah memiliki nilai rata-rata yaitu 2,23 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank belum mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT Bank Victoria Syariah belum menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Victoria Syariah dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Victoria Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip

		<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Bank Victoria Syariah telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 10. PT BCA Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan tim *self assessment* PT BCA Syariah pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,80 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2014 - 2016 sebesar 1,00. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT BCA Syariah memiliki nilai rata-rata yaitu 1,27 berada di bawah rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT BCA Syariah sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT BCA Syariah dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT

BCA Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dekom telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Prinsip-prinsip GCG dan ketentuan Perundang-undangan berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite telah sesuai dengan ketentuan & prinsip-prinsip GCG
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Kegiatan Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai ketentuan & prinsip prinsip GCG termasuk Sharia Aspect
6	Penanganan benturan kepentingan	Benturan kepentingan dapat dihindari dengan baik, mengacu kepada kebijakan intern Bank
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	gsi Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku serta di lengkapi dengan kebijakan intern
8	Penerapan fungsi audit intern	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan SPFAIB dan pedoman intern yang berlaku
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik

11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku
----	--	--

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT BCA Sayriah telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan sangat baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparancy*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responcibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 11. PT Maybank Indonesia

Hasil penilaian yang dilakukan tim *selt assessment* PT Maybank Indonesia pada tahun 2012 – 2016 memperlihatkan nilai komposit terbesar terdapat pada tahun 2015 - 2016 yaitu sebesar 3,00 sedangkan untuk nilai komposit yang terkecil terdapat pada tahun 2014 sebesar 2,00. Nilai komposit tahun 2012 – 2016 pada PT Maybank Indonesia memiliki nilai rata-rata yaitu 2,50 berada di atas rata-rata industri yaitu 1,87 artinya bank belum mencapai efisiensi dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilihat dari rata-rata industri sehingga bila dilihat dari prinsip yang berada didalamnya, PT

Maybank Indonesia belum menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawab, kemandirian dan kewajaran secara maksimal. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Maybank Indonesia dengan pengawasan langsung dari Dewan Komisaris Independen.

Cacatan hasil penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) PT Maybank Indonesia

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk pernghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh Bank telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang <i>concern</i> dalam menangani

		fungsi kepatuhan Bank
8	Penerapan fungsi audit intern	Secara keseluruhan penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan tugasnya dengan independen
10	Batas maksimum penyaluran dana	Penyalurkan dana kepada pihak terkait telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, Lap. Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dari tahun 2012 sampai 2016 PT Maybank Indonesia telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (*Transparency*) yang ditunjukkan ada nomor 11; Akuntabilitas (*Accountability*) ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3 dan 8; Tanggung Jawab (*Responsibility*) ditunjukkan dengan nomor 10 Independensi (*Independency*) ditunjukkan dengan nomor 4, 6, dan 7; dan Kewajaran (*Fairness*) ditunjukkan dengan nomor 5 dan 9. Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang berlaku.

#### 4.4 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari *Return on asset*

*Return on asset* (ROA) bisa digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode. Bila rasio ROA yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga semakin besar sehingga bila dilihat dari pengguna aset juga semakin baik. Bila rasio ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien. Rasio ROA bisa digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode.

##### Perhitungan Rasio *Return on Asset* (ROA)

No	Nama Bank	Rasio ROA					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,02	1,38	-0,04	0,53	0,55	0,88
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	0,16	0,45	0,15	0,19	0,22	0,23
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	3,02	2,19	0,30	0,30	2,40	1,64
4	PT Bank Syariah BNI	1,29	1,22	1,13	1,34	1,32	1,26
5	PT Bank Syariah BRI	0,98	1,06	0,05	0,70	0,86	0,73
6	PT Bank Syariah Bukopin	0,67	0,63	0,24	0,70	0,82	0,61
7	PT Bank Jabar dan Banten	-0,54	0,91	0,56	0,25	-7,34	-1,23

8	PT Bank Panin Syariah	2,32	0,72	1,54	1,06	0,32	1,19
9	PT Bank Victoria Syariah	1,43	0,50	-1,87	-2,36	-2,19	-0,90
10	PT BCA Syariah	0,68	0,82	0,58	0,73	0,99	0,76
11	PT Maybank Indonesia	2,72	2,57	3,13	- 22,45	- 10,75	-4,96
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>0,02%</b>					

Berdasarkan perhitungan ROA yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Pada tahun 2012 – 2014 Rasio ROA mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai angka -0,04% yang menjadi Rasio ROA terkecil dikarenakan adanya penurunan aset produktif, lalu pada tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2012 menjadi Rasio ROA terbesar yaitu sebesar 2,02% karena pada tahun ini aset dari bank tumbuh sehingga dapat dikatakan bahwa aset yang digunakan pada tempat produktif berjalan baik. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki Rasio ROA yang mengalami penurunan dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 0,88% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga

sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki Rasio ROA yang cenderung menurun maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

## 2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Pada tahun 2012 – 2014 Rasio ROA mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai angka 0,15% yang menjadi Rasio ROA terkecil karena ada kenaikan biaya serta timbulnya beban pencadangan kerugian aset produktif akibat penurunan kualitas portofolio pembiayaan, lalu pada tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2013 menjadi Rasio ROA terbesar yaitu sebesar 0,45% karena adanya pertumbuhan aset produktif sehingga dapat dikatakan bahwa aset yang digunakan pada tempat produktif berjalan baik. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki Rasio ROA yang mengalami penurunan dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 0,53% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari

penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki Rasio ROA yang cenderung menurun maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

### 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2014 dan 2015 Rasio ROA mengalami prosentase yang konstan sehingga sebesar 0,30%. Lalu pada tahun 2012 menjadi Rasio ROA terbesar karena mencapai 3,81% disebabkan oleh aset produktif yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga dikatakan bahwa aset yang digunakan pada tempat produktif berjalan baik. Namun pada 2016 PT Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan yang baik sehingga Rasio ROA menjadi 2,40%. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 1,64% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka

keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki Rasio ROA yang cenderung besar di beberapa periode maka akan memberikan pengaruh positif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang dicapai juga semakin besar sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangat efisien di beberapa periode.

#### 4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase namun cenderung konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2012 – 2014 Rasio ROA mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 rasio ROA hanya sebesar 1,13%. Pada tahun 2013 sebesar 1,13% merupakan rasio ROA terkecil karena peningkatan signifikan atas keuntungan bank pada tahun berjalan serta tetap menjaga pertumbuhan dan kualitas aset dan 2015 – 2016 Rasio ROA kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 Rasio ROA sebesar 1,32% karena pada tahun ini bank sanggup meningkatkan asetnya dari pada tahun sebelumnya walaupun dengan kondisi turunnya harga komoditas dunia. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BNI memiliki Rasio ROA yang mengalami perubahan yang konsisten dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 1,26% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka

keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Syariah BNI memiliki Rasio ROA yang cenderung besar disetiap periodenya maka akan memberikan pengaruh positif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai juga semakin besar sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangat efisien di beberapa periode.

#### 5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2016 Rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 menjadi Rasio ROA terbesar sebesar 1,06% karena total aset pada tahun ini meningkat adanya kenaikan pembiayaan dan penempatan pada bank lain, lalu pada tahun 2014 mengalami penurunan yang menjadi Rasio ROA terkecil hanya sebesar 0,05% dikarenakan kinerja belum maksimal pada penggunaan aset produktif. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BRI memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 0,73% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT

Bank Syariah BRI memiliki Rasio ROA yang cenderung kecil maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

#### 6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2016 Rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 menjadi Rasio ROA terkecil hanya sebesar 0,24% karena pada tahun ini bank mendapat tekanan likuiditas yang bersumber dari meningkatnya biaya dana telah mengoreksi pertumbuhan keuntungan Perseroan, lalu pada tahun 2016 menjadi Rasio ROA terbesar yaitu sebesar 0,82% karena bank mampu meningkatkan total aset sehingga mampu merealisasikan pencapaian aset terbesar yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2015. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 0,61% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT

Bank Syariah Bukopin memiliki Rasio ROA yang cenderung kecil maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

#### 7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Pada tahun 2012 – 2013 Rasio ROA mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2012 Rasio ROA yaitu -0,54% dan tahun 2013 Rasio ROA meningkat menjadi 0,91%. Pada tahun 2014 – 2016 terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2016 menjadi Rasio ROA terkecil yaitu sebesar -7,34% karena pada tahun ini Rasio NPF dan Rasio BOPO berada diatas rata-rata industri sehingga menekan keuntungan yang didapatkan oleh bank. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar -1,23% berada di bawah rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga belum efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki Rasio ROA yang

cenderung kecil hingga memperoleh angka minus maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangat tidak efisien.

#### 8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 - 2015 Rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya namun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan. Sehingga pada tahun 2012 menjadi Rasio ROA terbesar yaitu sebesar 2,32% karena tahun ini aktiva produktif perseroan tumbuh dibandingkan tahun 2011 didukung dari pembiayaan dan piutang kepada pihak ketiga sisanya ditempatkan pada surat berharga sebagai *secondary reserve* dan penempatan dana antar bank sebagai alternatif investasi jangka pendek. Pada tahun 2016 menjadi Rasio ROA terkecil yaitu sebesar 0,32% karena pada tahun ini akibat dari meningkatnya biaya pencadangan yang disebabkan oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Panin Syariah memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 1,19% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang

dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Panin Syariah memiliki Rasio ROA yang cenderung besar di beberapa periode maka akan memberikan pengaruh positif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai juga semakin besar sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangat efisien di beberapa periode.

#### 9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan prosentase terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2012 – 2013 Rasio ROA mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2012 Rasio ROA yaitu 1,43% yang menjadi rasio ROA terbesar karena adanya peningkatan aset bank yang tumbuh namun masih lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 karena tingginya beban biaya untuk pengembangan segmen mikro *finance* di bank dan tahun 2013 Rasio ROA menurun menjadi 0,50%. Pada tahun 2014 – 2016 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka minus sehingga pada tahun 2015 menjadi Rasio ROA terkecil yaitu sebesar -2,36% karena tahun ini bank perlu membentuk tambahan dana cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar sehingga total aset bank menurun dari tahun sebelumnya untuk lebih menjaga aset yang lebih berkualitas. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Victoria Syariah memiliki Rasio ROA yang mengalami penurunan dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar -0,90% berada di bawah

rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga belum efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Bank Victoria Syariah memiliki Rasio ROA yang cenderung kecil hingga memperoleh angka minus maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangat kurang efisien.

#### 10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuatif prosentase. Pada tahun 2012 – 2016 Rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada PT BCA Syariah Rasio ROA terkecil hanya sebesar 0,58% pada tahun 2014 pada tahun yang sama adanya peningkatan total aset dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan, lalu Rasio ROA terbesar hanya sebesar 0,99% pada tahun 2016 karena didukung oleh total aset yang mengalami pertumbuhan dari keanikan surat berharga dan pembiayaan. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT BCA Syariah memiliki Rasio ROA yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar 0,76% berada di atas rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank sudah mencapai

efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT BCA Syariah memiliki Rasio ROA yang cenderung cukup kontan maka akan memberikan pengaruh positif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum cukup efisien.

#### 11. PT Maybank Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan dan penurunan prosentase terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2012 – 2014 Rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan yang awalnya pada tahun 2012 Rasio ROA yaitu 2,72% dan tahun 2014 Rasio ROA menjadi 3,13% yang menjadi Rasio ROA terbesar karena total aset yang dimiliki oleh bank meningkat sehingga aset yang digunakan pada tempat produktif berjalan baik. Pada tahun 2015 – 2016 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka minus sehingga pada tahun 2015 menjadi Rasio ROA terkecil yaitu sebesar -22,45% karena total aset yang dimiliki bank menurun harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Maybank Indonesia memiliki Rasio ROA yang mengalami cenderung menurun dan memiliki rata-rata Rasio ROA sebesar -4,96% berada di bawah

rata-rata industri yaitu 0,02% artinya bank belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga belum efektif. Artinya *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada PT Maybank Indonesia memiliki Rasio ROA yang cenderung kecil hingga memperolah angka minus maka akan memberikan pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum sangatkurang efisien.

#### 4.5 Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dilihat dari *Capital Adequacy Ratio*

*Capital Adequacy Ratio* merupakan perbandingan jumlah modal bank dengan jumlah ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko). CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko misalkan pembiayaan. Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 bahwa kewajiban menyediakan modal minimum sebesar 8% dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bila Rasio CAR diatas standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva. Bila Rasio CAR dibawah standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka dikatakan modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien.

##### Perhitungan Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

No	Nama Bank	Rasio CAR					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	13,82	14,10	14,12	12,85	14,01	13,78
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	11,57	14,05	14,15	12,00	12,74	12,90
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	13,51	12,99	19,26	18,72	23,53	17,60

4	PT Bank Syariah BNI	19,07	16,23	18,43	15,48	14,92	16,83
5	PT Bank Syariah BRI	11,35	14,49	12,89	13,94	20,63	14,66
6	PT Bank Syariah Bukopin	13,85	10,24	14,80	16,31	17,00	14,44
7	PT Bank Jabar dan Banten	21,09	17,99	15,83	22,53	18,25	19,14
8	PT Bank Panin Syariah	32,20	20,83	25,69	20,30	18,17	23,46
9	PT Bank Victoria Syariah	17,96	17,93	15,27	16,14	15,98	16,66
10	PT BCA Sayriah	31,47	22,35	29,57	34,33	36,78	46,34
11	PT Maybank Indonesia	63,89	59,41	52,13	38,40	55,06	53,78
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>22,69</b>					

Berdasarkan perhitungan CAR yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 14,12% namun tidak lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya pembayaran pembiayaan dan pembayaran subordinasi. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 12,85% karena pada tahun ini bank berusaha untuk menopang ekspansi bisnis PT Bank Syariah Mandiri pada semua lini bisnis pada tahun 2016. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 13,78% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat

dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah Mandiri dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

## 2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 11,57% karena akibat ekspansi pembiayaan yang cukup agresif di tahun 2012 dan merupakan Rasio yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2013 sebesar 14,05% karena pemegang saham memiliki komitmen jangka panjang terhadap PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dan mendukung penerbitan saham baru (*rights issue*) sehingga bank memiliki tambahan modal. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah

Muamalat Indonesia memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 12.90% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

### 3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 12,99% karena perusahaan banyak melakukan pembenahan internal dan penguatan infrastruktur yang sedikit banyak turut mengurangi permodalan. Selain itu, upaya

pendanaan untuk mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah di tengah perekonomian yang cenderung melambat selama 2013 dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 23,53% karena mendapat suntikan dana dari Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 17,60% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah Mega Indonesia dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 4. Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 19,07% karena peningkatan jumlah aset tertimbang yang lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah modal menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dan Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 14,92% pada tahun ini terbantu karena adanya peningkatan modal secara berkelanjutan sejalan dengan kenaikan profitabilitas yang berkesinambungan. Di tahun 2016 mendapat tantangan dari kondisi makro ekonomi nasional dan kebijakan Pemerintah yang menekan angka suku bunga menjadi *single digit*. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BNI memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 16.83% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah BNI dikatakan baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin

besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah BNI memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2012 sebesar 11,35% dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 20,63%. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah BRI memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 14,66% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah BRI dikatakan baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan

semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah BRI memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 0,24% karena bank melakukan ekspansi yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2013 ditujukan untuk pembiayaan dengan target *market* sektor UMKM; investasi bidang teknologi informasi, jaringan kantor, dan memperkuat Sumber Daya Insani dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 17,00% karena pada tahun ini bank dapat menumbuhkan bisnisnya dengan baik sehingga modal yang diterima juga meningkat. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 14,44% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal

sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Syariah Bukopin dikatakan baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2014 sebesar 15,83% dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 22,53% karena pada tahun ini induk perusahaan yang melakukan penambahan dana setoran modal dan deviden tahun 2014 yang disetorkan kembali untuk memperkuat permodal yang akan digunakan untuk mitigasi risiko dan melakukan ekspansi bisnis. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 19,14% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara

langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Jabar dan Banten dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki tingkat kecukupan modal yang baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase setiap tahunnya. Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 32,20% karena bank mampu *survive* dan bersaing di industri perbankan syariah dari sisi permodalan PT Bank Panin Syariah sudah kuat namun pada tahun ini terdapat penambahan modal karena jumlah ekuitas yang meningkat dan Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 18,17% karena pada tahun ini bank berusaha meningkatkan kemampuan dalam menyerah potensi kerugian akibat Risiko Pembiayaan. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Panin Syariah memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 23,46% berada di atas rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan sudah mencukupi setiap

kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana sudah maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Panin Syariah dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Panin Syariah memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 17,96% karena dari pihak bank melakukan pengembangan jaringan yang dilakukan oleh Direksi pada tahun 2012 sehingga berdampak positif terhadap perkembangan bisnis baik dari segi pembiayaan maupun pendanaan menghasilkan peningkatan yang signifikan dan Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2014 sebesar 15,27% karena harga komoditas yang menurun. Dari

data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Victoria Syariah memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 16,66% berada di bawah rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain masih ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana belum maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Victoria Syariah dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Victoria Syariah memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 10. PT BCA Sayriah

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung menurun. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2013 sebesar 22,35% karena total ekuitas meningkat pada tahun ini sehingga modal

yang dimiliki juga meningkat dari pada tahun sebelumnya dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2016 sebesar 36,78% mampu mempertahankan rasio kewajiban modal minimum diatas syarat Bank Indoneisa karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Bank Victoria Syariah memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 46,34% berada di atas rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan sudah mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana sudah maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Bank Victoria Syariah dikatakan sangat baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Bank Victoria Syariah memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

## 11. PT Maybank Indonesia

Pada periode tahun 2012 – 2016 terus mengalami fluktuatif prosentase yang cenderung meningkat. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 38,40% dan Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2012 sebesar 63,89% karena pada tahun 2012 menandai paripurnanya proses konversi Maybank Syariah Indonesia menjadi bank umum syariah. Dari data yang sudah ada bahwa pada PT Maybank Indonesia memiliki Rasio CAR yang mengalami fluktuatif dan memiliki rata-rata Rasio CAR sebesar 53,78% berada di atas rata-rata industri yaitu 22,69% artinya modal yang digunakan suatu perusahaan sudah mencukupi setiap kegiatan yang ada di perusahaan secara efisien atau dengan kata lain tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2012 – 2016 sehingga modal yang akan digunakan untuk sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil-laba dan untuk menggalang dana sudah maksimal. Artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dikenal sebagai kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko pada PT Maybank Indonesia dikatakan baik karena berada di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% pada tahun 2012 – 2016 karena semakin besar Rasio CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik. Sehingga pada PT Maybank Indonesia memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

#### 4.6 Analisis Kinerja Keuangan Bank

Setelah dilakukan perhitungan rasio kinerja keuangan pada 11 bank syariah yang ada di Indonesia, maka selanjutnya akan dilakukan penganalisisan hasil perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan metode RGEK. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menilai apakah kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia dapat dikategorikan Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik atau Tidak Baik. Perkembangan pada masing-masing bank akan dinilai dengan menggunakan metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Dengan masing-masing Rasio yang digunakan yaitu *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Good Corporate Governance, Return on Assets, dan Capital Adequacy Ratio*. Hasil ringkasan perhitungan kinerja keuangan pada masing-masing bank sebagai berikut :

##### 4.6.1 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio *Non Performing Financing*

No	Nama Bank	Rasio NPF					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,82	4,32	6,84	6,06	4,92	4,99
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	2,09	4,69	6,55	7,11	3,83	4,85
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	2,67	2,99	3,89	4,26	3,30	3,42
4	PT Bank Syariah BNI	2,02	1,86	1,86	2,53	2,94	2,24

5	PT Bank Syariah BRI	1,78	1,55	1,69	2,02	2,03	1,81
6	PT Bank Syariah Bukopin	4,59	4,27	4,07	2,99	3,17	3,82
7	PT Bank Jabar dan Banten	4,46	1,86	5,84	6,93	17,91	7,40
8	PT Bank Panin Syariah	0,20	1,02	0,53	2,63	2,26	1,33
9	PT Bank Victoria Syariah	3,19	3,71	7,10	9,80	7,31	6,22
10	PT BCA Sayriah	0,10	0,10	0,10	0,70	0,50	0,35
11	PT Maybank Indonesia	2,49	2,69	5,04	35,15	43,99	17,87
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>4,94</b>					

No	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	NPF	4,94	2

Berdasarkan tabel kinerja keuangan pada sebelas bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata – rata industri ditinjau dari faktor NPF secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Baik” karena berada pada peringkat rata-rata adalah peringkat 2, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor penilaian pada NPF. Bila dilihat dari rata – rata industri rasio NPF masih berada di bawah standar peraturan Bank Indonesia artinya mampu menghadapi indikasi masalah pada pembiayaan macet sehingga mampu menghadapi masalah pada arus kas dan mampu menjaga likuiditas bank.

Karena bila ada penundaan maka modal bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif dan deposan-nasabah tidak akan mendapatkan penghasilan apapun.

#### 4.6.2 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio *Financing to Deposit Ratio*

No	Nama Bank	Rasio FDR					Rata-Rata
		%					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	94,40	89,37	82,13	82,25	79,46	85,52
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	94,15	99,57	83,71	90,30	95,44	92,63
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	87,41	92,88	92,77	96,71	94,82	92,92
4	PT Bank Syariah BNI	84,99	98,42	92,60	91,94	84,57	90,50
5	PT Bank Syariah BRI	95,43	102,70	92,50	84,16	81,42	91,24
6	PT Bank Syariah Bukopin	91,98	100,29	92,89	90,56	88,18	92,78
7	PT Bank Jabar dan Banten	99,44	97,40	84,02	104,75	99,28	96,98
8	PT Bank Panin Syariah	105,66	90,40	94,04	94,81	90,79	95,14
9	PT Bank Victoria Syariah	73,77	84,66	95,11	95,29	100,66	89,90
10	PT BCA Sayriah	79,86	82,16	91,17	91,41	90,12	86,94

11	PT Maybank Indonesia	197,7 0	110,5 4	157,7 7	152,8 7	197,7 0	163,32
<b>Rata-Rata Industri</b>		<b>97,99</b>					

No	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	FDR	97,99	3

Berdasarkan tabel kinerja keuangan pada sebelas bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata – rata industri ditinjau dari faktor FDR secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Cukup Baik” karena berada pada peringkat rata-rata adalah peringkat 3, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor penilaian pada FDR. Bila dilihat dari rata – rata industri rasio FDR masih berada pada standar peraturan Bank Indonesia artinya cukup mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank cukup mampu menjalankan fungsinya. Karena secara umum bila Rasio FDR berada pada posisi standar dapat menghasilkan keuntungan.

#### 4.6.3 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio *Good Corporate*

##### *Governance*

No	Nama Bank	Rasio GCG					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,25	1,85	2,10	1,50	2,00	1,94
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1,15	1,15	3,00	3,00	2,00	2,06
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	1,60	1,87	2,00	1,54	1,64	1,73
4	PT Bank Syariah BNI	1,25	1,30	2,00	2,00	2,00	1,71
5	PT Bank Syariah BRI	1,38	1,35	1,74	1,61	1,60	1,54
6	PT Bank Syariah Bukopin	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,60
7	PT Bank Jabar dan Banten	3,00	1,78	1,89	2,50	2,58	2,35
8	PT Bank Panin Syariah	1,35	1,35	1,40	2,00	2,00	1,62
9	PT Bank Victoria Syariah	2,07	1,66	1,93	3,00	2,49	2,23
10	PT BCA Sayriah	1,80	1,55	1,00	1,00	1,00	1,27
11	PT Maybank Indonesia	2,30	2,17	2,00	3,00	3,00	2,50
<b>Rata-Rata Industri</b>							<b>1,87</b>

No	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	GCG	1,87	2

Berdasarkan tabel kinerja keuangan pada sebelas bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata – rata industri ditinjau dari faktor GCG secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Baik” karena berada pada peringkat rata-rata adalah peringkat 2, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor penilaian pada GCG. Bila dilihat dari rata – rata industri rasio GCG artinya proses dan struktur digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas untuk tujuan utama yaitu mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* dapat diterapkan secara baik. Didalam penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 memiliki lima prinsip didalam penilaiannya terdapat transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) dapat diterapkan secara baik.

#### 4.6.4 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio *Return on Assets*

No	Nama Bank	Rasio ROA					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	2,02	1,38	-0,04	0,53	0,55	0,88
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	0,16	0,45	0,15	0,19	0,22	0,23
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	3,02	2,19	0,30	0,30	2,40	1,64

4	PT Bank Syariah BNI	1,29	1,22	1,13	1,34	1,32	1,26	
5	PT Bank Syariah BRI	0,98	1,06	0,05	0,70	0,86	0,73	
6	PT Bank Syariah Bukopin	0,67	0,63	0,24	0,70	0,82	0,61	
7	PT Bank Jabar dan Banten	-0,54	0,91	0,56	0,25	-7,34	-1,23	
8	PT Bank Panin Syariah	2,32	0,72	1,54	1,06	0,32	1,19	
9	PT Bank Victoria Syariah	1,43	0,50	-1,87	-2,36	-2,19	-0,90	
10	PT BCA Sayriah	0,68	0,82	0,58	0,73	0,99	0,76	
11	PT Maybank Indonesia	2,72	2,57	3,13	- 22,45	- 10,75	-4,96	
<b>Rata-Rata Industri</b>								<b>0,02</b>

No	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	ROA	0,02	4

Berdasarkan tabel kinerja keuangan pada sebelas bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata – rata industri ditinjau dari faktor ROA secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Kurang Baik” karena berada pada peringkat rata-rata adalah peringkat 4, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor penilaian pada ROA. Bila dilihat dari rata – rata industri rasio ROA artinya bank secara umum kurang efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode.

#### 4.6.5 Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio *Capital Adequacy Ratio*

No	Nama Bank	Rasio CAR					Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PT Bank Syariah Mandiri	13,82	14,10	14,12	12,85	14,01	13,78
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	11,57	14,05	14,15	12,00	12,74	12,90
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	13,51	12,99	19,26	18,72	23,53	17,60
4	PT Bank Syariah BNI	19,07	16,23	18,43	15,48	14,92	16,83
5	PT Bank Syariah BRI	11,35	14,49	12,89	13,94	20,63	14,66
6	PT Bank Syariah Bukopin	13,85	10,24	14,80	16,31	17,00	14,44
7	PT Bank Jabar dan Banten	21,09	17,99	15,83	22,53	18,25	19,14
8	PT Bank Panin Syariah	32,20	20,83	25,69	20,30	18,17	23,46
9	PT Bank Victoria Syariah	17,96	17,93	15,27	16,14	15,98	16,66
10	PT BCA Sayriah	31,47	22,35	29,57	34,33	36,78	46,34
11	PT Maybank Indonesia	63,89	59,41	52,13	38,40	55,06	53,78
<b>Rata-Rata Industri</b>							<b>22,69</b>

No	Rasio	Rata-Rata Industri	Peringkat
1	CAR	22,69	1

Berdasarkan tabel kinerja keuangan pada sebelas bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata – rata industri ditinjau dari faktor CAR

secara keseluruhan mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Sangat Baik” karena berada pada peringkat rata-rata adalah peringkat 1, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor penilaian pada CAR. Bila dilihat dari rata – rata industri rasio CAR masih berada di atas standar peraturan Bank Indonesia artinya maka memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* untuk sebelas Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2012 – 2016 dalam kategori “baik” karena memiliki rata – rata industri sebesar 4,94. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank Syariah yang ada di Indonesia “baik” dalam mengelola risiko pembiayaan pada pembiayaan yang dikategorika tidak lancar atau macet.
2. *Financing to Deposit Ratio* untuk sebelas Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2012 – 2016 dalam kategori “cukup baik” karena memiliki rata – rata industri sebesar 97,99. Hal ini menunjukkan pada tingkat kemampuan bank dalam membayarkan kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan “cukup baik” meskipun jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar.
3. *Good Corporate Governance* untuk sebelas Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2012 – 2016 dalam kategori “baik” karena memiliki rata – rata industri sebesar 1,87. Hal ini menunjukkan penilaian terhadap 11 aspek penilaian *Good Coporate Governance* (GCG) Bank Syariah yang berada di Indonesia telah menetapkan dan mengaplikasikan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip transparasi (*transparency*), akuntanbilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi

(*independency*) dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan perseroan. Pelaksanaan GCG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berjalan efektif dan efisien.

4. *Return on Assets* untuk sebelas Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2012 – 2016 dalam kategori “kurang baik” karena memiliki rata – rata industri sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan penghambat pertumbuhan laba dan kurang efektifnya dalam menggunakan aset perusahaan.
5. *Capital Adequacy Ratio* untuk sebelas Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2012 – 2016 dalam kategori “sangat baik” karena memiliki rata – rata industri sebesar 22,69. Hal ini menunjukkan mampu melaksanakan pengelolaan permodalan dengan sangat baik sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan. Setiap bank memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya dan dapat mengatasi kemungkinan terjadinya risiko.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan analisis dan penelitian, penulis dapat memberikan saran kepada perusahaan atau penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Kinerja keuangan suatu bank dapat menarik *stakeholder* untuk memberikan kepercayaannya dalam menanamkan dananya ke dalam suatu bank tersebut. Sehingga suatu bank disarankan memperkuat kegiatan usaha agar jumlah aset yang dimiliki semakin meningkat, jumlah penyaluran dana baik dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan di bank lain semakin meningkat,

serta pendapatan operasional dan laba yang diperoleh untuk tahun-tahun berikutnya semakin meningkat yang bersaing dengan bank lain.

2. Berdasarkan rasio – rasio yang digunakan untuk pengukuran Bank Syariah yang ada di Indonesia terdapat beberapa bank pada beberapa periode yang mengalami fluktuatif yang tajam. Dengan hal ini perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar pada rasio – rasio tersebut terus mengalami peningkatan yang baik dan memiliki konsistensi untuk tahun – tahun berikutnya.
3. Bila dilihat dari faktor GCG setiap Bank Syariah yang ada di Indonesia perlu diperhatikan, bila sudah memiliki Rasio GCG baik maka harus dipertahankan dan bila kurang baik perlu ditingkatkan karena dimulai dari tata kelola perusahaan yang baik maka akan berdampak baik juga kepada seluruh kegiatan operasional yang terapat di setiap bank. Hal ini dimaksudkan agar di tahun- tahun berikutnya setiap bank dapat mengurangi risiko yang akan dihadapi dan bank dapat menjadi lebih baik dan lebih dipercaya oleh para *stakeholder* yang dimiliki oleh setiap bank.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian pada bank konvensional agar dapat dibandingkan dengan bank syariah yang berada di Indonesia dengan kategori tertentu. sehingga kasus – kasus yang terjadi pada suatu bank dapat dipelajari dan menjadi inspirasi bagi bank lain yang memerlukan secara *up to date*. Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih luas dan jauh lebih baik lagi serta memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Budisantoso, T dan Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Daniswara Fitria dan Harsa Sumarta Nurmadi. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital* (RGEC) Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014. ISSN0215-3092.

Ghofur Anshori Abdul. 2009. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.

Hasibuan, Melayu SP. 2005. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Husnan, Suad dan Pudjiastuti Enny. 2012. Manajemen Keuangan. Edisi Keenam. Jakarta: UPP STIM YKPN.

<http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile-2/>.

<https://bursanom.com/rgec-kesehatan-bank/>.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>.

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/27/154707/peran-dan-kesiapan-perbankan-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean/#.WO3V6dwxXIU>.

[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file\\_skripsi/Isi2126465632558.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2126465632558.pdf).

<http://www.contohsurat.co.id/2016/11/pengertian-bank.html>.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>.

Ismail, Dr., MBA. Ak. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.

Kasmir. S.E., M.M. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. S.E., M.M. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khajibatur Rizkiyah Suhadak. 2017. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital (RGEC)* Pada Bank Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 43 No.1.

Muhammad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad (2014) Manajemen Dana Bank Syariah. 1st edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Permana, Bayu Aji. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Siregar Syofian (2013) Metode Penelitian Kuantitatif. 1st edn. Jakarta: Prenada Media Group.

Syafii Anonio Muhammad. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Tri Santoso Ruddy. 1995. Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan. Yogyakarta: Andi Offset.

V Agdal University Mohammed. Moroccan Banks Analysis Using CAMEL Model.  
2014. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 4 No. 3  
2014 pp. 622-627 ISSN:214-4138.